

**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI DI YOGYAKARTA





**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI DI YOGYAKARTA





Peta Pembinaan Provinsi Di Yogyakarta

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN : 978-623-88512-3-2

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Fuadi Hanif, S.Stat
2. Tito Dwian Maulana, S.Stat
3. Jerry Walo, S.Sos, MM

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	3

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

A. KABUPATEN BANTUL	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	6
Aspek Satuan Inovasi Daerah	6
B. KABUPATEN GUNUNG KIDUL	22
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	23
Aspek Satuan Inovasi Daerah	23
C. KABUPATEN KULON PROGO	31
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	32
Aspek Satuan Inovasi Daerah	32
D. KABUPATEN SLEMAN	40
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	41
Aspek Satuan Inovasi Daerah	41
E. KOTA YOGYAKARTA	50
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	51
Aspek Satuan Inovasi Daerah	51

BAB III REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Kabupaten Bantul	62
B. Kabupaten Gunung Kidul	62
C. Kabupaten Kulon Progo	62
D. Kabupaten Sleman	62
E. Kota Yogyakarta	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Bantul

Gambar 2. Grafik Capaian Aspek SPD Kab. Bantul

Gambar 3. Diagram Inovasi Kab. Bantul berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

Gambar 4. Diagram Inovasi Kab. Bantul berdasarkan Bentuk Inovasi

Gambar 5. Diagram Inovasi Kab. Bantul berdasarkan Jenis Inovasi

Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Bantul

Gambar 7. Diagram Inovasi Kab. Bantul berdasarkan Inisiator Inovasi

Gambar 8. Grafik Sebaran Urusan Inovasi Kab. Bantul

Gambar 9. Diagram Inovasi Kab. Bantul berdasarkan Skor Kematangan

Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Dukung Dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Bantul

Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Bantul

Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Gunung Kidul

Gambar 13. Grafik Capaian Aspek SPD Kab. Gunung Kidul

Gambar 14. Diagram Inovasi Kab. Gunung Kidul berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

Gambar 15. Diagram Inovasi Kab. Gunung Kidul berdasarkan Bentuk Inovasi

Gambar 16. Diagram Inovasi Kab. Gunung Kidul berdasarkan Jenis Inovasi

Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Gunung Kidul

Gambar 18. Diagram Inovasi Kab. Gunung Kidul berdasarkan Inisiator Inovasi

Gambar 19. Grafik Sebaran Urusan Inovasi Kab. Gunung Kidul

Gambar 20. Diagram Inovasi Kab. Gunung Kidul berdasarkan Skor Kematangan

Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Dukung Dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Gunung Kidul

Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Gunung Kidul

Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Kulon Progo

Gambar 24. Grafik Capaian Aspek SPD Kab. Kulon Progo

Gambar 25. Diagram Inovasi Kab. Kulon Progo berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

Gambar 26. Diagram Inovasi Kab. Kulon Progo berdasarkan Bentuk Inovasi

Gambar 27. Diagram Inovasi Kab. Kulon Progo berdasarkan Jenis Inovasi

Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Kulon Progo

Gambar 29. Diagram Inovasi Kab. Kulon Progo berdasarkan Inisiator Inovasi

Gambar 30. Grafik Sebaran Urusan Inovasi Kab. Kulon Progo

Gambar 31. Diagram Inovasi Kab. Kulon Progo berdasarkan Skor Kematangan

Gambar 31. Grafik Tingkat Keterisian Data Dukung Dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Kulon Progo

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Kulon Progo

Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Sleman

Gambar 35. Grafik Capaian Aspek SPD Kab. Sleman

Gambar 36. Diagram Inovasi Kab. Sleman berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

Gambar 37. Diagram Inovasi Kab. Sleman berdasarkan Bentuk Inovasi

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta

Gambar 38. Diagram Inovasi Kab. Sleman berdasarkan Jenis Inovasi

Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Sleman

Gambar 40. Diagram Inovasi Kab. Sleman berdasarkan Inisiator Inovasi

Gambar 41. Grafik Sebaran Urusan Inovasi Kab. Sleman

Gambar 42. Diagram Inovasi Kab. Sleman berdasarkan Skor Kematangan

Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Dukung Dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Sleman

Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Sleman

Gambar 44. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Yogyakarta

Gambar 46. Grafik Capaian Aspek SPD Kota Yogyakarta

Gambar 46. Diagram Inovasi Kota Yogyakarta berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

Gambar 47. Diagram Inovasi Kota Yogyakarta berdasarkan Bentuk Inovasi

Gambar 48. Diagram Inovasi Kota Yogyakarta berdasarkan Jenis Inovasi

Gambar 49. Grafik Progres Jumlah Inovasi berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Yogyakarta

Gambar 50. Diagram Inovasi Kota Yogyakarta berdasarkan Inisiator Inovasi

Gambar 51. Grafik Sebaran Urusan Inovasi Kota Yogyakarta

Gambar 52. Diagram Inovasi Kota Yogyakarta berdasarkan Skor Kematangan

Gambar 53. Grafik Tingkat Keterisian Data Dukung Dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Yogyakarta

Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Yogyakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Aspek, Variabel, dan Indikator pada Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2. Daftar Inovasi Kab. Bantul

Tabel 3. Daftar Inovasi Kab. Gunung Kidul

Tabel 4. Daftar Inovasi Kab. Kulon Progo

Tabel 5. Daftar Inovasi Kab. Sleman

Tabel 6. Daftar Inovasi Kota Yogyakarta



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi di atas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah (IID). Secara umum, Penilaian inovasi daerah melalui 4 (empat) tahapan, yaitu tahap penjarangan, tahap pengukuran, tahap presentasi kepala daerah dan tahap peninjauan lapangan. Pelaksanaan IGA telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan pada tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi IID berbasis web yang dapat diakses melalui tautan <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>.

Setiap tahun Kemendagri melakukan penjarangan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021, Kemendagri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 Pemda melalui aplikasi IID. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 diikuti penilaian IID diikuti oleh 188 Pemda dengan jumlah inovasi 3.718, pada tahun 2019 diikuti oleh 260 Pemda dengan jumlah inovasi 8.016 dan pada tahun 2020 diikuti oleh 484 Pemda dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari Pemda untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian IID tahun 2021 lalu diperoleh hasil 37 Pemda berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemda berkategori Inovatif, 166 Pemda berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemda berkategori Tidak Dapat Dinilai. Penerima penghargaan IGA ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Khusus untuk kluster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh

ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan IGA merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas kematangan inovasi serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelembagaan inovasi dan kemampuan menyinergikan antara kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat. Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi hadir untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya.

Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei, yaitu kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur, komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang dilakukan sudah menuju ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemda perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemda dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya dengan mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kemendagri melakukan pembinaan baik kepada Pemda yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah maupun Pemda yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah;
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian IID tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan dan dilaporkan kepada Kemendagri oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 dan 2020. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. Aspek SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variable Infrastruktur, variable Output Pengetahuan dan Teknologi, variable Kecepatan Bisnis Proses, variable Kecanggihan Produk, serta variable Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator *input* dan proses. Indikator *input* dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Struktur Aspek, Variabel, dan Indikator dari IID dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Daftar Aspek, Variabel, dan Indikator pada Indeks Inovasi Daerah

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
	Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian	Jumlah Inovasi Daerah
		Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi
Roadmap SiDA		
SDM	Nilai IPM	
	Penghargaan Bagi Inovator	
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah

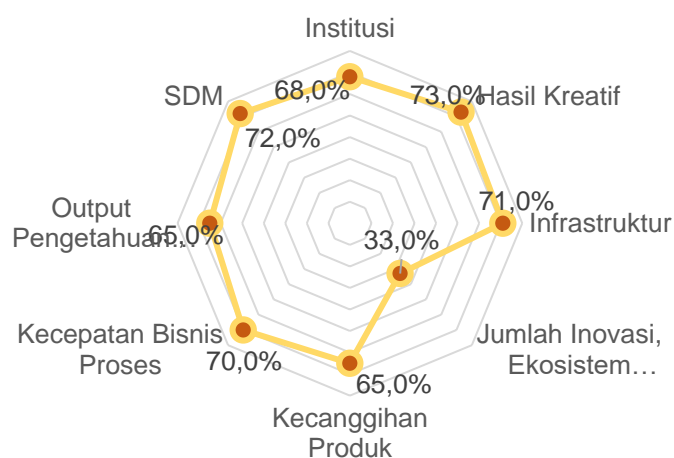
ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah



BAB II

***INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN
DAN KLASTER KOTA***

A. KABUPATEN BANTUL



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Bantul

Berdasarkan diagram di atas, capaian skor tertinggi variabel Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bantul yaitu variabel Hasil Kreatif dengan skor 73% yang dapat diartikan bahwa secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki keterisian dominan pada parameter tertinggi (parameter 3 – persentase di atas 67%). Variabel lainnya yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter tertinggi yaitu variabel Sumber Daya Manusia (72%), variabel Infrastruktur (71%), dan variabel Kecepatan Bisnis Proses (70%).

Sedangkan variabel yang memiliki skor terendah yaitu Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian dengan skor 33% yang dapat diartikan bahwa secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut memiliki keterisian dominan pada parameter sedang (parameter 2 – persentase antara 33% s.d 66%). Kabupaten Bantul tidak memiliki variabel yang keterisian dominan pada parameter rendah (parameter 1 – persentase berada di bawah 33%).

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 2. Grafik Capaian Aspek SPD Kab. Bantul

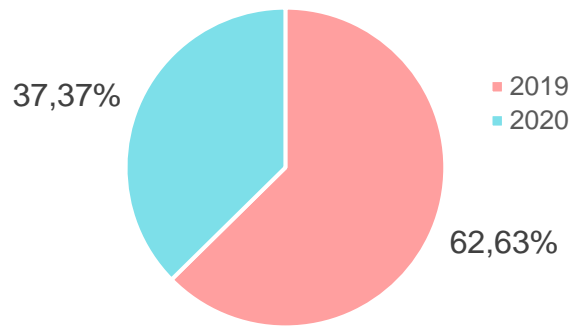
Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Bantul. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data tahun 2019. Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi perbaikan pada beberapa indikator. Indikator Kualitas Perizinan menjadi indikator yang mengalami peningkatan paling signifikan yaitu 175.23% dan Indikator Pendapatan Perkapita meningkat 28.30%.

Sedangkan indikator yang tidak mengalami perbaikan signifikan yaitu indikator Jumlah Investasi yang menurun 99.43%, Jumlah PAD menurun 29.10%, Penurunan Angka Kemiskinan yang turun 2.79% yang artinya terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sejumlah 2.79%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun 8.18% yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 8.18% dibandingkan tahun 2019, dan Nilai IPM menurun 0.03%. Berdasarkan uraian di atas, indikator yang memerlukan perbaikan adalah indikator Jumlah Investasi, Jumlah PAD, Angka Kemiskinan, indikator TPT dan Nilai IPM yang disebabkan adanya penurunan progres pada masing-masing indikator tersebut.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

Pada tahun 2019 dan 2020, tercatat 290 satuan inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Bantul dengan rincian sebagaimana berikut:

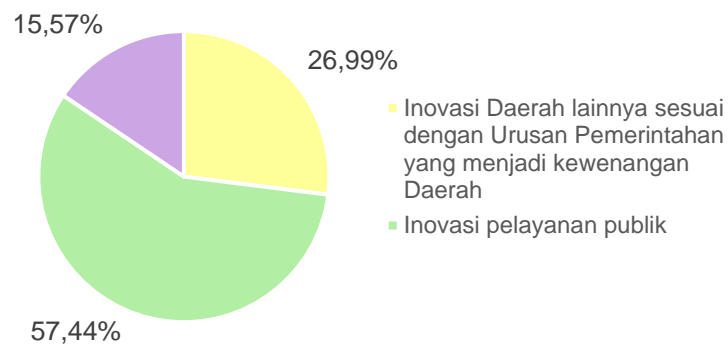
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3. Diagram Inovasi Kab. Bantul berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

Berdasarkan tahun penerapan, inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Bantul pada umumnya telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat sebanyak 181 (62.63%) inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 dan 108 (37.37%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

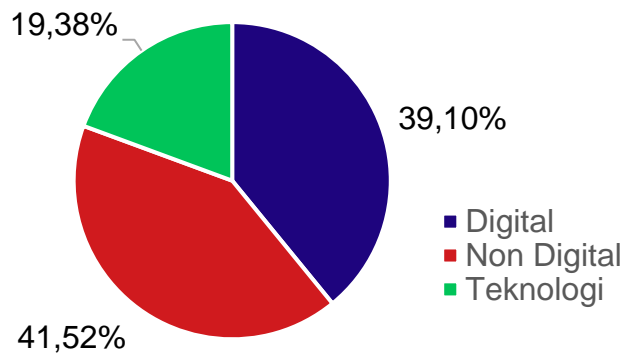
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4. Diagram Inovasi Kab. Bantul berdasarkan Bentuk Inovasi

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Bantul pada umumnya berbentuk Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 166 (57.44%) inovasi. Selanjutnya, bentuk Inovasi Daerah Lainnya sebanyak 78 (26.99%), dan 45 (15.57%) inovasi lainnya berbentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

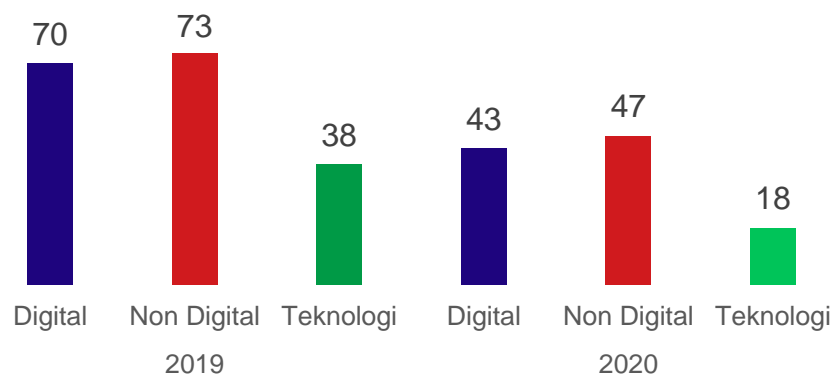
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5. Diagram Inovasi Kab. Bantul berdasarkan Jenis Inovasi

Berdasarkan jenis inovasi, 120 (41.52%) inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Bantul berjenis Inovasi Non-Digital. Selanjutnya, 113 (39.10%) inovasi merupakan Inovasi Digital, dan 56 (19.38%) inovasi merupakan Inovasi Teknologi.

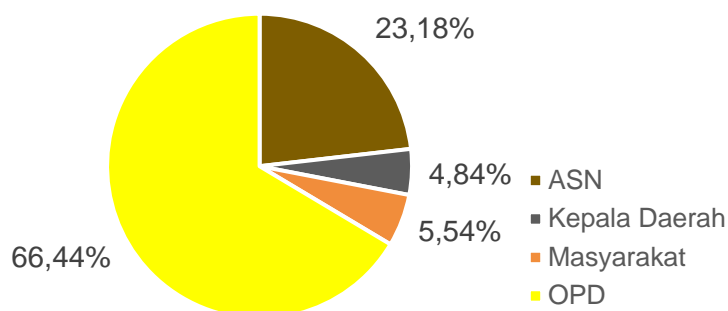
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Bantul

Berdasarkan progres jumlah inovasi berdasarkan tahun dan dikaitkan dengan jenis inovasi, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada jenis Inovasi Digital, Inovasi Non Digital, dan Inovasi Teknologi. Jumlah Inovasi Digital pada tahun 2019 yaitu sebanyak 70 inovasi namun menurun pada tahun 2020 menjadi 43 inovasi, jumlah Inovasi Non Digital pada tahun 2019 yaitu sebanyak 73 inovasi namun menurun pada tahun 2020 menjadi 47 inovasi, dan jumlah Inovasi Tekonologi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 38 inovasi namun menurun pada tahun 2020 menjadi 18 inovasi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



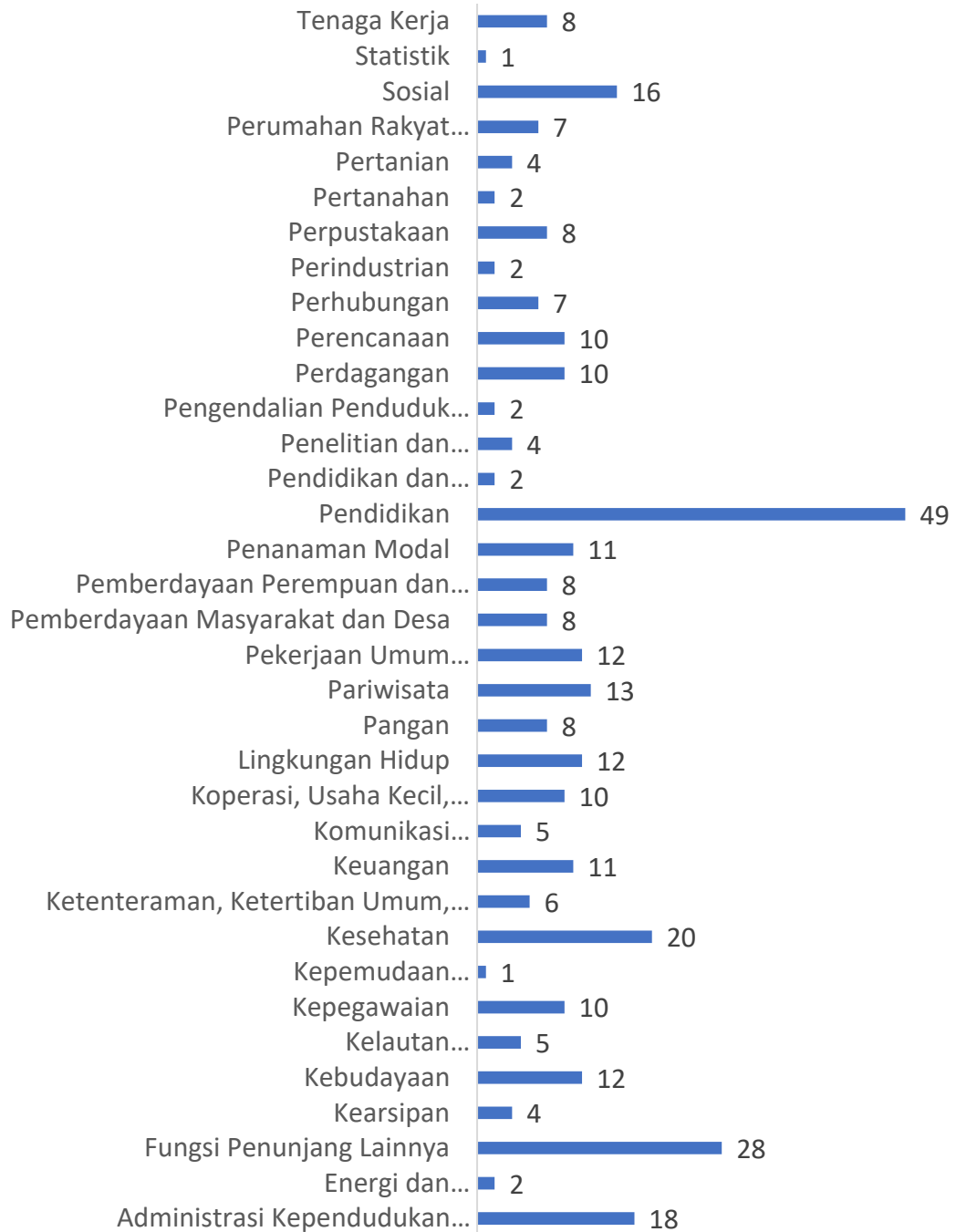
Gambar 7. Diagram Inovasi Kab. Bantul berdasarkan Inisiator Inovasi

Berdasarkan inisiator inovasi, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Bantul pada umumnya merupakan inisiasi secara kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dengan jumlah 192 (66.44%) inovasi. Selanjutnya, inisiasi inovasi lainnya diperoleh dari ASN sebanyak 67 (23.18%) inovasi, dan inisiasi dari Masyarakat sebanyak 16 (5.54%) inovasi dan 14 (4.84%) inovasi lainnya diinisiasi oleh Kepala Daerah.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

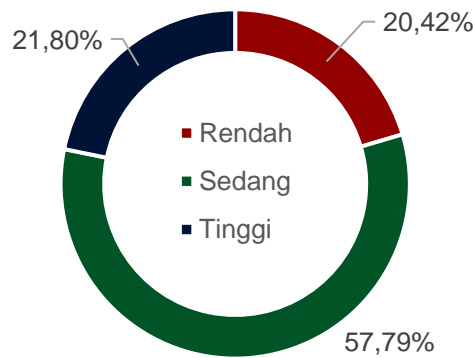
Sebaran inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Bantul berdasarkan urusan pemerintahan sangat beragam baik Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar (Wajib – Pelayanan Dasar), Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Wajib – Non Pelayanan Dasar), serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Dari 6 Urusan Wajib – Pelayanan Dasar, inovasi yang dilaporkan Pemda Kabupaten Bantul tersebar pada semua urusan dengan sebaran inovasi tertinggi terdapat pada urusan Pendidikan dengan jumlah inovasi sebanyak 49 inovasi. Pada Urusan Wajib – Non Pelayanan Dasar, inovasi sebaran inovasi tertinggi terdapat pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admdukcapil) dengan jumlah inovasi sebanyak 18 inovasi. Pada Urusan Pilihan, sebaran inovasi tertinggi terdapat pada urusan Pariwisata dengan jumlah inovasi sebanyak 13 inovasi.

Sedangkan jika tanpa melihat batasan urusan, 3 urusan yang memiliki sebaran inovasi tertinggi yaitu urusan Pendidikan dengan jumlah inovasi sebanyak 49 Inovasi, urusan Fungsi Penunjang Lainnya sebanyak 28 Inovasi, serta urusan Kesehatan sebanyak 20 Inovasi. Rincian sebaran inovasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 8. Grafik Sebaran Urusan Inovasi Kab. Bantul

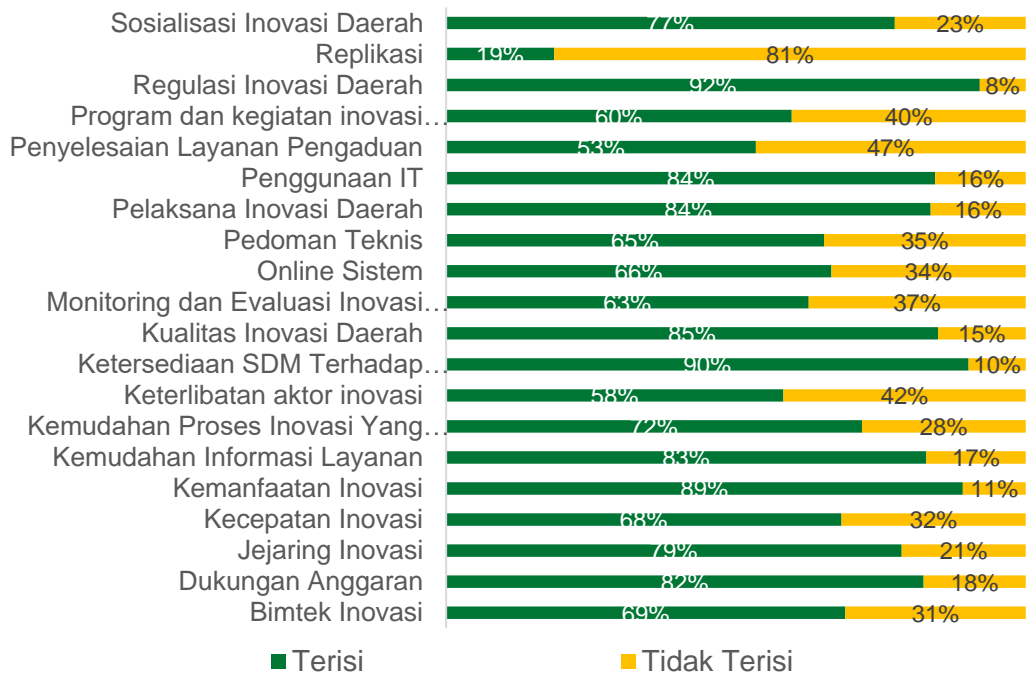
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9. Diagram Inovasi Kab. Bantul berdasarkan Skor Kematangan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi Kabupaten Bantul pada umumnya memiliki skor kematangan sedang (antara 50-100) sebanyak sebanyak 167 (57.79%) inovasi. Selanjutnya, terdapat 63 (21.80%) inovasi dengan skor kematangan tinggi dan 59 (20.42%) inovasi dengan skor kematangan rendah.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

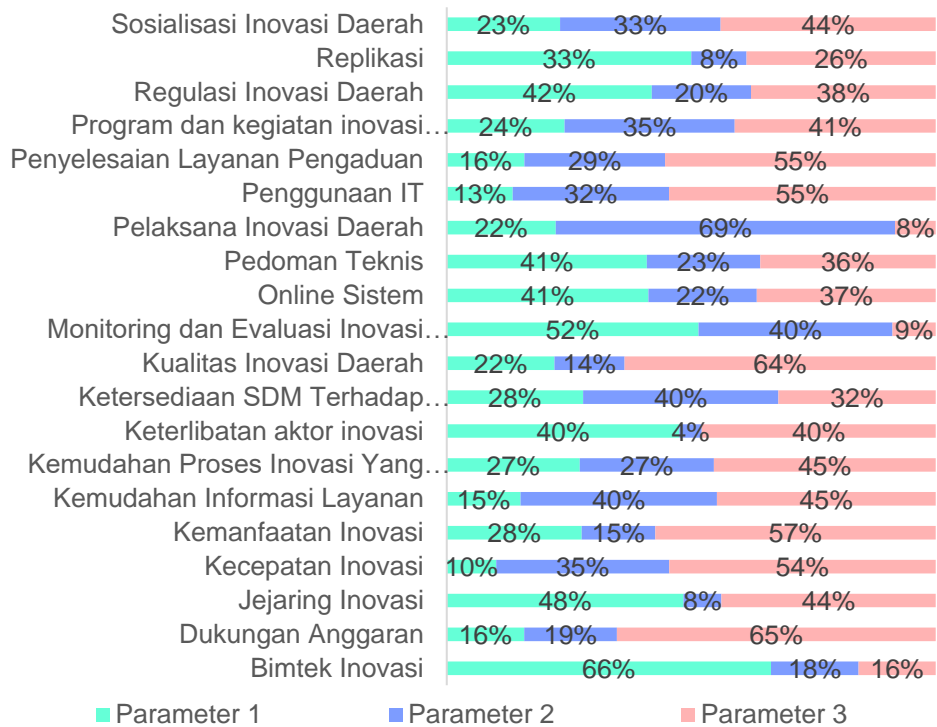


Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Dukung Dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Bantul

Dari 290 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bantul diperoleh rata-rata keterisian data dukung pada indikator satuan inovasi yaitu 71.92%, sedangkan 28.08% lainnya tidak

dilengkapi dengan data dukung. Indikator yang memiliki tingkat keterisian data dukung tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi dengan tingkat keterisian sebesar 92%. Sedangkan indikator yang memiliki tingkat keterisian data dukung terendah adalah indikator Replikasi dengan tingkat keterisian 19% yang artinya 81% dari inovasi yang dilaporkan tidak dilengkapi data dukung pada indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Bantul

Secara umum, indikator-indikator yang dilengkapi dengan data dukung pada satuan inovasi daerah Kabupaten Bantul terisi dengan Parameter 3 (40.53%). Selanjutnya, 30.40% terisi dengan Parameter 1 dan 26.57% terisi dengan Parameter 2. Berdasarkan gambar di atas, beberapa indikator yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter 3 adalah indikator Dukungan Anggaran (65%), Kualitas Inovasi (64%), dan Kemanfaatan Inovasi (57%). Beberapa indikator yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter 2 adalah indikator Pelaksana Inovasi (69%) dan Ketersediaan SDM (40%). Adapun indikator yang memiliki keterisian dominan pada parameter 1 tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi (66%) yang artinya 66% inovasi yang dilaporkan telah memiliki data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kab. Bantul beserta Skor Kematangannya (SK)

Tabel 2. Daftar Inovasi Kab. Bantul

NAMA INOVASI	SK
SIMASNEG (INTEGRASI E-PRESENSI DAN E-TPP)	139
RAJUTAN SIBAKUL JOGJA (CARA JITU USAHA TANGGUH DENGAN SISTEM PEMBINAAN KOPERASI DAN PELAKU USAHA)	135
MANTUL (MANTEN ANYAR ENTUK TELU)	129
PARON (PARKIR ONLINE)	124
MANTRA SARILAYA (MAKAM AMAN DAN TERTATA RAPI)	124
SISTEM REGISTRASI ONLINE (SIREGOL) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	124
SERBU IKANKU	123
BLUEPRINT INVESTASI DPMPPT GUNUNGKIDUL	122
APLIKASI NGLARISI	122
SIDA SAMEKTA	121
TUAN NONAKU (BANTUAN PANGAN NON TUNAI APBD KABUPATEN KULON PROGO)	119
SEPATU JOLIFA (SISTEM PERPUSTAKAAN TERPADU JOGJA LIBRARY FOR ALL)	119
BUMILKU	118
SAPA RATU (SARANA PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU TANPA TURUN DARI KENDARAAN)	118
LAYANAN KONSULTASI HUKUM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI "MBAK RATU" (MASYARAKAT TERBUKA AKSES, PROSEDUR DAN ATURAN HUKUM)	117
ONE STOP KAVLING MAKAM	117
INOVASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	116
OPTIMALISASI KINERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOMUNIKSI DAN INFORMATIKA GUNUNGKIDUL	116
DAYA INDRA	116
SIMOKU	115
SISTEM KAMPUNG PANGAN LESTARI TERPADU	115
SICANTIKKU	113
POJOK KOPI-KU (POJOK KONSULTASI PENGAWASAN INTERN KULON PROGO)	113
GATOT SEHAT	113
SERAT LAYON (SERAHKAN AKTA KEMATIAN SAAT PEMBERANGKATAN LAYON/JENASAH)	113
DILAN E-IRTP DIGITALISASI LAYANAN SERTIFIKASI PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA YOGYAKARTA	113
CEK POIN JOGJA (LAYANAN INFORMASI POTENSI INVESTASI KOTA YOGYAKARTA BERBASIS ANDROID YANG TERINTEGRASI DENGAN JOGJA SMART SERVICE (JSS)	113
BINA INTAN BERLIAN (PEMBINAAN INTENSIF ANAK BERBAKAT DAN PILIHAN) SD ISLAM AL AZHAR 31 YOGYAKARTA	113
PASAR SIAGA COVID-19	112

NAMA INOVASI	SK
JESICA MARON (JENDELA INFORMASI KECAMATAN MANTRIJERON)	112
INOVASI MOBGEN (PELAYANAN MOBIL JENAZAH MELALUI APLIKASI JSS)	112
SINTA SP (SISTEM INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN)/CSR	112
TANIKU	111
PEKA LATIKA PRIMA	111
PROMKES PEMBATAAN GULA 4 SDM/HARI DAN GARAM 1 SDT/HARI DI ANTRIAN PENGUNJUNG TINGKATKAN PENGETAHUAN DIABETES MELLITUS DAN HIPERTENSI	110
RAMPUNG PANERTIB (GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB)	110
PANDUAN PEMBINAAN DAN KONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	110
PEPAK-SADAP (PETA PENDIDIKAN DALAM APLIKASI SATU DATA PENDIDIKAN) KABUPATEN SLEMAN	110
REVITALISASI KAWASAN PINGGIR SUNGAI UNTUK PENGEMBANGAN RTH PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA	109
RETROFIT PJU LINGKUNGAN HEMAT ENERGI	109
MINI CORPU	109
E-RETRIBUSI PASAR	108
PERCEPATAN PELAYANAN TERPADU K4 DI KECAMATAN GEDONGTENGAN	108
SIMPEL SALDO ONSITE DI KOTA YOGYAKARTA (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN SANITASI AIR LIMBAH DOMESTIK SISTEM ONSITE DI KOTA YOGYAKARTA)	108
BENDUNG LEPEN KAMPUNG MRICAN KELURAHAN GIWANGAN	108
JOJAPLAN: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIY YANG ORDINATE (KONSISTEN, RESPONSIF, DINAMIS, DAN AKUNTABEL) DENGAN E-PLANNING	107
BANTU PERI IUMK OSS (MEMBANTU PERIJINAN IUMK MELALUI OSS)	107
SIMPEN JALU (SISTEM INFORMASI MANAGEMEN PJU)	106
INOVASI PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN SUNGAI WINONGO DAN SUNGAI GAJAHWONG	105
SI JAMBUL MANDI DI KOLAM (SISTIM PINJAM BUKU SERTA LITERATUR SECARA MANDIRI OLEH KOMUNITAS, SEKOLAH, DAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT)	104
LAYANAN DAWAI ASMARA (DIGITALISASI ARSIP KEPEGAWAIAN DENGAN APLIKASI YANG MANFAAT DAN RAMAH)	104
MISI ZIMBRA (MIGRASI MAIL SERVER DARI QMAIL MENJADI ZIMBRA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)	103
FORM DAFTAR KEBUTUHAN DAN PERMINTAAN DATA AUDIT OPERASIONAL	103
WARSIMAH (WARUNG EDUKASI OMAH KREATIF LOEDJI 16)	103
JAKONKU (TIDAK MEMENUHI 5 INDIKATOR MANDATORI)	102
SIM KIA (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN IBU DAN ANAK)	102

NAMA INOVASI	SK
SI BAKUL (SISTEM PEMBINAAN KOPERASI DAN PELAKU USAHA)	102
BINTANG SRAWUNG KOTA (PEMBINAAN TATA RUANG SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN RUANG YANG BERKUALITAS DI KOTA YOGYAKARTA)	102
REVITALISASI TANAMAN LANGKA DAN BERFILOSOFI PADA RTH PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA	102
PASAR BARTER KEC BANGUNTAPAN	100
SI HITAM MANIS SALAH SATU SOLUSI MENUJU GREEN HOSPITAL	100
MASUK SATU KELUAR EMPAT	100
E-MUP	100
SIPANJANG (SISTEM PELAYANAN SAMPAI KE RANJANG) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGGIDUL, YOGYAKARTA	99
SLEMAN MART	99
PELAYANAN IZIN ONLINE KKN DI MASA PANDEMI	99
PPDB ONLINE	99
"DODOLAN" PROGRAM PENINGKATAN PENETRASI PASAR INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KOTA YOGYAKARTA	98
DELIVERY ORDER PEMUSTAKA ISTIMEWA	98
APLIKASI JAKON-KU	97
SIMONS APLIKASI MONITORING SISWA UNTUK ORANG TUA	97
SIMPEL (SISTEM PELAYANAN TERINTEGRASI) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL GUNUNGGIDUL	96
PKBM NGUDI KAWRUH GULUREJO LENDAH	96
E-SIKS (ELEKTRONIK- SISTEM INFORMASI KEBUDAYAAN SLEMAN)	96
GALI CEKAT TUNTAS (GERAKAN LITERASI, SABTU CERDAS BERKARAKTER DAN SABTU ONLINE BERPRESTASI)	96
INOVASI E-REGULASI	96
E-JOURNAL IDEGURU: SAHABAT LITERASI DAN KARIER GURU	96
PERI JEMPOL BOSS	95
PUSTAKA DIGITAL PEMBANGUNAN DAERAH	95
JELAJAH POTENSI LOKAL KECAMATAN SRANDAKAN	95
INOVASI SIDOL (SISTEM INFORMASI ADUAN SOSIAL ONLINE)	95
EMBUN KRISTAL (ENAM BULAN PEMERIKSAAN TOTAL)	95
E-PRODA, E-PROCUREMENT DAERAH TERINTEGRASI	95
SISDATKU (SISTEM SATU DATA KUKM)	94
PENGUAT TANGAN MENJADI PANGAN	94
SILALING (SISTEM INFORMASI KELOLA LINGKUNGAN)	94
SISTEM INFORMASI PELAYANAN MUTASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH (PENYEMPURNAAN MAIP YANG TELAH ADA DAN DISEMPURNAKAN SECARA ONLINE)	94
KAMPUNG KOMPOSTER	93
MOBILE KLINIK KONSULTASI KEMASAN	93
SISTEM PANDUAN RANCANG (SIMPANCANG) INTEGRASI DATA RTBL DI KOTA YOGYAKARTA	93
KUKUS (BUKU SAKU SPIP)	93
STUDENT LED CONFERENCE	93

NAMA INOVASI	SK
TAMAN PINTAR SCIENSATION VIRTUAL TOUR	92
SIKAP (SISTEM INFORMASI KEKERASAN ADUAN ANAK DAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER)	92
OPTIMALISASI PENILAIAN RISIKO MELALUI MEDIA E-BOOK BAGAN ALUR	92
KONSOL ADMINDUK (KONSULTASI ONLINE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)	92
"SIK ASYIK STORY READING" DENGAN MEMBACA BUKU CERITA ANAK MENJADI ASYIK	92
SIM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	91
JARAN SEKSI (JATHILAN GARAPAN SENI KLASIK DAN KREASI)	91
KKA-ON! GOOGLE SHEET (KERTAS KERJA AUDIT ONLINE MENGGUNAKAN APLIKASI GOOGLE SHEET)	91
PANDUAN PENGAWASAN DAN KONSULTASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	91
GERAKAN SEKOLAH MENYENGGKAN (GSM) SD NEGERI BANYUREJO 2	91
LDR (LITERASI DI RUMAH)	91
SEPAKAT (SEKARANG BAYAR PAJAK LEBIH DEKAT)	90
TAMAN PINTAR INTEGRATED ECO MANAGEMENT	90
SI PENTAS JAWARAKU (SISTEM PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN KALURAHAN DI KULON PROGO)	90
MOBSI (MOBILE PRESENSI)	90
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI METODE 3T (TONTON, TERKA, TERAPKAN) UNTUK PEMECAHAN SOAL TIPE HOTS	90
SMART DSS	89
HOME CARE RUMAH SAKIT JOGJA (HORE MASJO)	89
TRAINING CENTER KOMPETISI SAINS NASIONAL (KSN)	89
ARISAN PAK GELIS (PENGARSIPAN DAN INVENTARISASI DOKUMEN PENDUKUNG DUPAK DENGAN GOOGLE APLIKASI)	88
CATUR BUDAYA	88
ATAGA, ADU DAN TANYA DALAM GENGAMAN	88
PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN BIDANG KESEHATAN MELALUI SIDA SAMEKTA – SIKAB GUMREGAH (RATAKAN B'DAK SISKA) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	87
PEMBUATAN FITUR PENGINGAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA	87
NETWORK SHARING SEBAGAI PUSAT DOKUMEN PENUGASAN AUDITOR	87
KASINAWA (APLIKASI RUSUNAWA) PEMBAYARAN E-RETRIBUSI RUSUNAWA	86
SIPETARUNG (SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG)	86
LAYANAN SOSIAL SATU PINTU SLEMAN SEMBADA	86
BATMAN TERBANG TERUS / BANTU MASYARAKAT TERTIB BANGUNAN DAN TERTIB USAHA	86
ENGLISH FOR MATH AND SCIENCE (ETHIC)	86
NEW NORMAL LIFE MPP	85

NAMA INOVASI	SK
SIBAKU (SISTEM INFORMASI BANK SAMPAH KULON PROGO)	85
PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	85
POS PELAYANAN HUKUM	85
ASYIKNYA GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN (GSM) DENGAN RANGKIANG LINGPOTIS	85
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP OLEH DLH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	85
SITARU (SISTEM INFORMASI TATA RUANG)	84
AH4SIAAP (AKSELERASI HASIL MELALUI 4 SIAP AKSI SISTEM PENYELENGGARAAN PELATIHAN KETERAMPILAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PENCARI KERJA DI KOTA YOGYAKARTA)	84
PAKET KOMANAN (PAKET KOMPLIT GANDOMANAN)	83
DAHAN APAKIN (DAFTAR BAHAN AUDIT PENDAHULUAN UNTUK AUDIT KINERJA)	83
REKAPITULASI TERPADU HASIL PENGAWASAN INTERNAL BERBASIS NETWORK SHARING DALAM RANGKA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	83
GOWES SAMR (PEMANFAATAN GOOGLE CLASSROOM TERINTEGRASI WEB SEKOLAH BERBASIS SAMR)	83
M-POSYANDU	82
FASUMKU LEGAL (FASILITASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK PENGURUSAN ALAS HAK FASILITAS UMUM DIATAS PERSIL MASYARAKAT)	82
GELIAT SIGAP (GERAKAN LITERASI TUMBUHKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN)	82
SIPATEN (SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRAI TERPADU KECAMATAN)	81
SIPENTOL (SISTEM PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI ONLINE) E-RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	81
MONITORING BOARD SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PENGAWASAN	81
SI BANK TANAH (SISTEM INFORMASI BASIS DATA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM)	81
PENURUNAN ANGKA UNMET NEED MELALUI KIE KELOMPOK DI KAMPUNG KB PAJEKSAN KELURAHAN SOSROMENDURAN KECAMATAN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA DIY	81
GERABAH SI BABE (GERAKAN MENGOLAH LIMBAH SAMPAH MENJADI BARANG BERHARGA)	81
GURU BERSELERA (GURU BLOGGER-YOUTUBER, SEKOLAH LITERAT)	81
SEKOLAH RISET	81
GSM (GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN)	80
SABARO (SAPA ARUH BACIRO ANTISIPASI CORONA)	80
TANDING MARU (TANDUR ING LEMAH TURU)	80
PERMAK (PELAYANAN RAMAH ANAK)	80
KAMPUNG SAYUR	79

NAMA INOVASI	SK
PROSES ALIH TEKNOLOGI SILASE BERBASIS HIJAUAN LOKAL DAN LIMBAH PERTANIAN DALAM RANGKA MENGATASI KELANGKAAN PAKAN	78
SISTEM INFORMASI KEBUDAYAAN (SIKEB)	78
SPALD-T (SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT) SKALA KAWASAN BERBASIS WISATA EDUKASI	78
SCIENCE CORNER TAMAN PINTAR DI YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA)	77
PODJOK LITERASI	77
MUCHILD TV	77
APLIKASI DUKCAPIL SMART BANTUL	77
STUDENTS EXCHANGE (STUDEX)	77
SEMBADA BELAJAR	77
KOPERASI SAHABAT SI MISKIN (PERAS HABIS)	76
E- PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (E- PKP) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA MENUJU PEGAWAI UNGGUL	76
LAHAN KE SURGA (LAYANAN KELURAHAN KECAMATAN TERINTEGRASI LAYANAN SURAT WARGA)	76
PELATIHAN LELE CENDOL KELURAHAN PANEMBAHAN	76
SATRIYA, SI PENGAWAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIY	76
SIMBANGKU (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK USAHA BERSAMA)	75
PATUT ONLINE	75
"RASANE VERA" GUNUNGKIDUL	74
OMPLONGKU	74
MOROLEGA (MOBIL OPERASIONAL LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN EFEKTIF SEKALIGUS AKURAT)	74
PAK TANI BASMI SUKET TEKI	74
"SITATA KEREN" SISTEM PENGENDALIAN TATA KALA DAN TATA KELOLA KINERJA PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN GUNUNGKIDUL	74
KADO UNTUK DILAN (KENDARAAN ANTAR DOKUMEN UNTUK DIFABEL LANSIA SERTA IBU HAMIL)	73
LAYANAN SATU JARI JELAJAH BANTUL	73
GELAS BELING (GERAKAN PELAKSANAAN BERSIH LINGKUNGAN) BAMBANGLIPURO	73
CEGAH DINI KONFLIK SOSIAL MELALUI JAGA WARGA DI TINGKAT DESA	73
PUDASERA (PUSAT DATA SERAPAN ANGGARAN)	73
WIDURI (WISATA EDUKASI KEARSIPAN)	73
PENGELOLAAN INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN (PENGEN SI HASAN)	72
PRIYAYI (RSUD PRAMBANAN PEDULI PENYEHATAN IBU DAN BAYI)	72
BELA GA' TEJA PENDIKAR	72

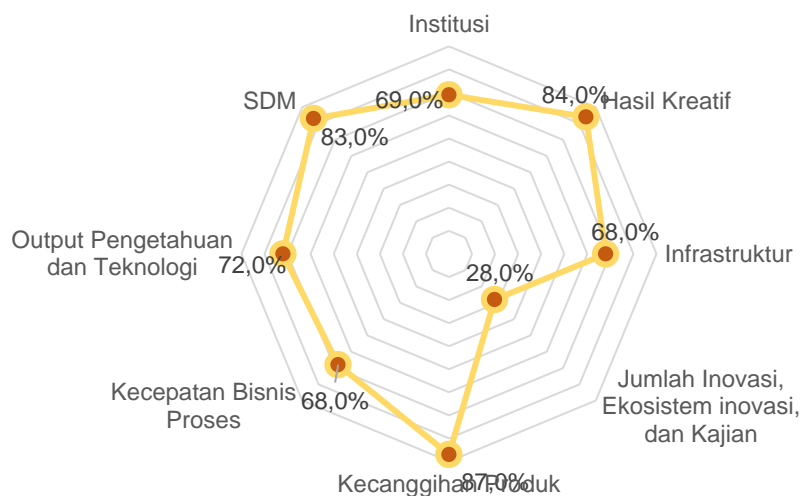
NAMA INOVASI	SK
EARLY WARNING SYSTEMS PADA SISTEM PENDAMPINGAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN OLEH RUMPUN BIDANG TERHADAP PERANGKAT DAERAH DI BAPPEDA KABUPATEN BANTUL	71
TARUNA AGNI KABUPATEN KULON PROGO <DELETE>	71
EVALUASI DIRI SEKOLAH	71
OPTIMALISASI KIE PADA IBU HAMIL DAN IBU NIFAS DALAM MENJARING KEIKUTSERTAAN KB DI KELURAHAN PRAWIRODIRJAN, KECAMATAN GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA	71
SIAP BERGERAK KEREN (SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN BERSAMA DALAM GERAKAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN TERENCANA)	71
POLA ASUH PENDIDIKAN KARAKTER KELUARGA DUA PULUH DELAPAN (PASUKAN RAGA 28)	71
KISAH PENGETIK (KEBIJAKAN SEKOLAH PENILAIAN MENGGUNAKAN TIK)	71
WAJIB KUNJUNG MUSEUM	71
SIKRESNO (SISTEM INFORMASI KENDARAAN REGISTRASI ONLINE)	70
TIM SAHABAT APBDES	70
PENGOLAHAN DATA PADA SIM DAN PENGINTEGRASIAN KKA UNTUK DESK AUDIT	70
DASA PERMATA (DANUREJAN SATU DENGAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN)	70
PELITA (PEDULI LINGKUNGAN SEKITAR)	70
KREDIT PASAR	70
GERAKAN MADU MANIS (GERAKAN MASYARAKAT PEDULI MENGATASI KEMISKINAN) DI KECAMATAN SEWON	69
PEMBUATAN BAHAN AJAR DENGAN APLIKASI SCREENCAST O MATIC	69
POS PPA (POS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) BARAK PENGUNGSIAN	68
KELUARGA CERDIG (CERDAS DENGAN LITERASI DIGITAL)	68
SEKOLAH DIGITAL	68
PACAR CANTIK (PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN)	67
SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA (SIMDAN)	67
PENARI DESA (PEMBINAAN RINTISAN DESA BUDAYA)	67
PAPAN PERMAINAN 7 LEVEL WINS DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	67
SIMPINTER (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERINTEGRASI)	67
LITERASI INVESTASI	66
BAMBANG DAN LARAS (MEMBANGKITKAN KEMBALI TEMBANG DOLANAN DAN PERMAINAN TRADISIONAL)	66
MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS BERSAMA MAMA KIKO	66
MENUJU SATU DATA INDONESIA DENGAN DATAKU	66
PAKDE BLANGKON (PENYULUHAN KESEHATAN DENGAN BARCODE LANGKAH ONLINE)	65

NAMA INOVASI	SK
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL	64
ROBOT UJI KOLONG PERHUBUNGAN BANTUL - ROJIKO HUBBA	64
LANTIP PANGGRAITA (LAYANAN TERPADU INVESTASI DAN PERIZINAN MELALUI PELAYANAN DIGITAL TANPA TATAP MUKA)	63
E-SURVEI IKM TERINTEGRASI	63
KAPERU (KTP BARU UNTUK PENGANTIN BARU)	63
PERCEPATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL	62
APLIKASI SURBAN (SURAT ELEKTRONIK BANTUL)	61
BEBAKULAN	61
SIM-ELOG (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN E-LOGISTIK)	60
PENGEMBANGAN "BOLU BAPER" (BONEKA MOLEKUL BERBAHAN KAIN PERCA)	59
APLIKASI USUL KENAIKAN PANGKAT APLUS KINANGKAT DAN PENERAPAN TTE DI DOKUMEN KEPEGAWAIAN	58
VIDEO PEMBELAJARAN : SAINS SEDERHANA	57
PENITI DARI RESTI (PENERAPAN LITERASI DALAM MERAIH PRESTASI)	57
PIPA MULTIFUNGSI UNTUK MEDIA PEMBELAJARAN OLAAHRAGA	56
KELUARGA DAR DER (KELUARGA SADAR GENDER)	56
GERAKAN "REMEM" (REVOLUSI MENTAL) UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH BERBASIS WISATA	56
PEMANFAATAN AIR BERKELANJUTAN UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA DENGAN MEMAKSIMALKAN PEMANFAATAN PEKARANGAN	54
MENGGAPAI MIMPI SAHABAT RIMBA	54
PEMBUATAN DEMUNG , SARON DAN PEKING DARI KAYU NANGKA SEBAGAI GAMELAN ALTERNATIF DI DUSUN SUMBER DESA CANDIREJO KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGGIDUL	53
MENUJU PEMBANGUNAN DIY YANG AKUNTABEL MELALUI SENGGUH	52
BPNT APBD	51
SIMBANGKU <DELETE>	49
SISIR ADMINDUK (SOSIALISASI INFORMASI DAN REKAM DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)	49
SI WANDANSARI (SLEMAN INOVASI WISATA PUSTAKA DAN BUDAYA DAERAH BAGI ANAK NEGERI)	49
MESIN PEMBUAT JALA IKAN	47
RENCANAKU 2.0	45
IKATAN CINTA (INDAHNYA KERJASAMA ALUMNI TANAMKAN AMANAH DAN CITA-CITA MENUJU INSAN YANG BERKARAKTER MULIA) SMP NEGERI 2 GODEAN	41
DENGAN POSDIG DAPAT MENINGKATKAN HASIL BELAJAR	36
SIPELURU JAMESBON (SISTEM PELAYANAN RUJUKAN JAMINAN KESEHATAN SOSIAL BERBASIS ONLINE)	35
MOVING CLASS TANPA JAM KOSONG	31
TOMIKU	27

NAMA INOVASI	SK
SI YOUMEET SEMANGATKU BELAJAR	27
SRI PACARKU	23
APLIKASI RESERVASI ONLINE VISITINGJOGJA	20
NEW NORMAL LIFE PELAYANAN HOTEL	15
NEW NORMAL LIFE PKB	15
VJ PUSPITA, NAVIGASI WISATA JOGJA TERPERCAYA	15
GLOBAL GOTONG ROYONG (G2R) TETRAPRENEUR: IKONIK GOTONG ROYONG EKONOMI INDONESIA	15
NEW NORMAL LIFE PASAR MODERN DAN TOMIRA	12
NEW NORMAL LIFE KULINER	12
NEW NORMAL LIFE DESTINASI WISATA	12
SENAM ANGGUK KULON PROGO	12
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO	12
TIPIRING ONLINE	12
KAWASAN SETRA INDUSTRI PERIKANAN AIR TAWAR DESA KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO	12
SID KU (SISTEM INFORMASI DESA KULONPROGO)	12
PEMANFAATAN MEDIA CCTV UNTUK KETERTIBAN SISWA DALAM SHOLAT BERJAMAAH DI MUSHOLA SMPN 4 KALASAN	12
KREATIFITAS PEMBELAJARAN	12
NEW NORMAL LIFE PASAR DAERAH	8
TATANAN NORMAL BARU PADA SEKTOR PASAR MODERN DI DIY	0
TATANAN NORMAL BARU PADA SEKTOR HOTEL DI DIY	0
TATANAN NORMAL BARU PADA SEKTOR TEMPAT WISATA DI DIY	0
TATANAN NORMAL BARU PADA SEKTOR PTSP DI DIY	0
TATANAN NORMAL BARU PADA PEMASARAN PRODUK UMKM DI DIY	0
TATANAN NORMAL BARU PADA SEKTOR TRANSPORTASI UMUM DI DIY	0
INFO PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS ANDROID	0
PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DIY	0
KERJASAMA TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN PADI DENGAN KELOMPOK TANI PENANGKAR BENIH	0
SISTEM APLIKASI ARSIP KEPEGAWAIAN (SI ARSIP)	0
APLIKASI BUKU TAMU DAN SUVEY KEPUASAN MASYARAKAT	0
SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK (SIGA) DIY MOBILE	0
SIAP DIKENAL (SISTEM APLIKASI PENGENDALIAN KINERJA)	0
WEBSITE PROFIL DISNAKERTRANS DIY	0
SI PATIH (SISTEM INFORMASI PELAYANAN INDUSTRI HYGIENE)	0
PENAGIHAN DOOR TO DOOR	0
E-RUSUNAWA APLIKASI PEMBAYARAN NON TUNAI SEWA UNIT RUSUNAWA JOGOYUDAN	0
SAKTI (SISTEM ANTAR KERJA BERBASIS TI)	0
IKM ONLINE	0
PENDAFTARAN MAGANG JEPANG ONLINE	0

NAMA INOVASI	SK
GO-JAK (GO PAJAK)	0
GO-DOOR (DOOR TO DOOR)	0
SIAP SERAP DAIS	0
SIPBANG DIY (SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN PERTAMBANGAN)	0
KARTU IJIN KELUAR ANAK ASUH (KIKA)	0
POINTS WEB	0
PENINGKATAN FASILITAS KERJASAMA DALAM NEGERI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	0
OPTIMALISASI PENGENDALIAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	0
PENELUSURAN SURAT ON-LINE OLEH PENGIRIM MELALUI E-OFFICE SISMINKADA	0
SAPA SENGGUH DAN SIMONA PEMDA DIY (INTEGRASI APLIKASI SENGGUH DAN SISTEM MONITORING APBN PEMDA DIY	0
PEMBUATAN 1 DATABASE/SHARING DATA DENGAN SISTEM CLOUD	0

B. KABUPATEN GUNUNG KIDUL

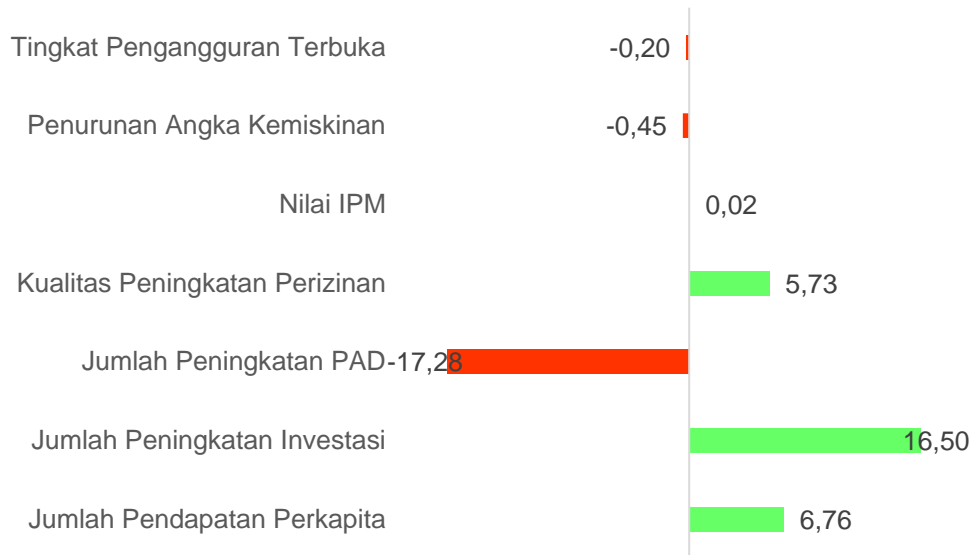


Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Gunung Kidul

Berdasarkan diagram di atas, capaian skor tertinggi variabel Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Gunung Kidul yaitu variabel Kecanggihan Produk dengan skor 87% yang dapat diartikan bahwa secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki keterisian dominan pada parameter tertinggi (parameter 3 – persentase di atas 67%). Variabel lainnya yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter tertinggi yaitu variabel Hasil Kreatif (84%),

variabel Sumber Daya Manusia (83%), Output Pengetahuan dan Teknologi (72%), variabel Institusi (69%), variabel Infrastruktur (79%), dan variabel Kecepatan Bisnis Proses (68%). Sedangkan variabel yang memiliki skor terendah yaitu variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian dengan skor 28% yang dapat diartikan bahwa secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut memiliki keterisian dominan pada parameter rendah (parameter 1 – persentase di bawah 33%).

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 13. Grafik Capaian Aspek SPD Kab. Gunung Kidul

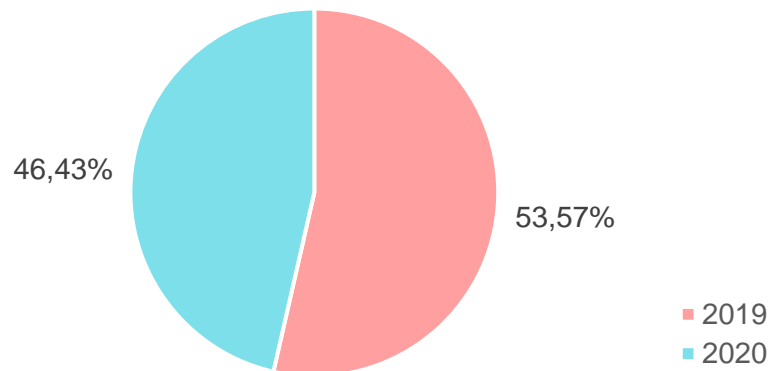
Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Gunung Kidul. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data tahun 2019. Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi perbaikan pada beberapa Indikator. Jumlah Investasi menjadi indikator yang mengalami peningkatan paling signifikan yaitu 16.50%. Jumlah Pendapatan Perkapita meningkat 6.76%, Kualitas Perizinan meningkat 5.73%, dan Indikator Nilai IPM meningkat 0.02%.

Sedangkan indikator yang tidak mengalami perbaikan signifikan adalah Indikator Jumlah PAD yang menurun 17.28%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun 0.20% yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 0.20% dibandingkan tahun 2019, dan indikator Penurunan Angka Kemiskinan turun 0.45% yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 0.45% dibandingkan tahun sebelumnya.. Namun, penurunan yang terjadi pada indikator TPT masih berada di atas standar nasional yaitu turun 0.92%. Berdasarkan uraian di atas, indikator yang memerlukan perbaikan adalah Indikator Jumlah PAD dan Indikator Angka Kemiskinan yang disebabkan adanya penurunan progres.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

Pada tahun 2019 dan 2020, tercatat 28 satuan inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Gunung Kidul dengan rincian sebagaimana berikut.

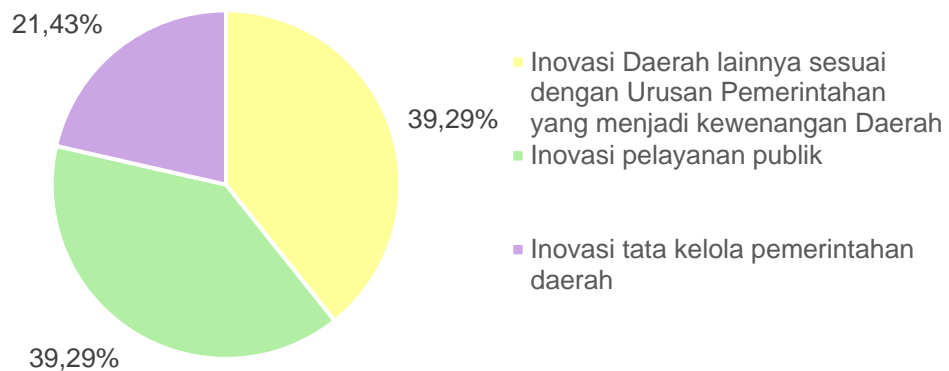
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14. Diagram Inovasi Kab. Gunung Kidul berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

Berdasarkan tahun penerapan, inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Gunung Kidul pada umumnya telah diterapkan pada tahun 2020. Terdapat sebanyak 15 (53.57%) inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 dan 13 (46.43%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

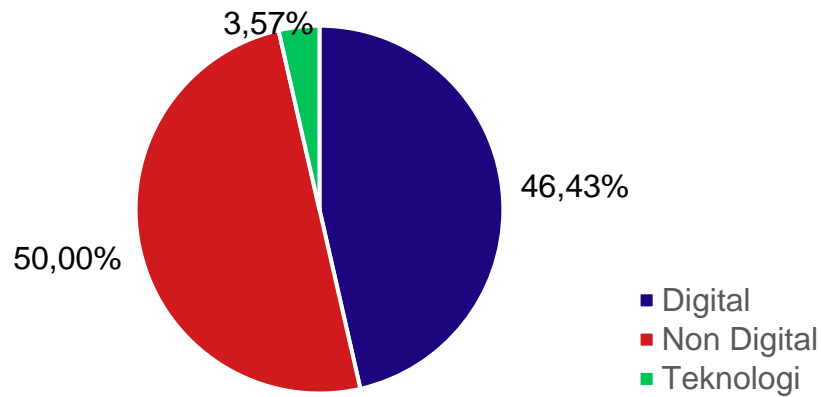
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 15. Diagram Inovasi Kab. Gunung Kidul berdasarkan Bentuk Inovasi

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Gunung Kidul pada umumnya berbentuk Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 11 (39.29%) dan bentuk Inovasi Daerah Lainnya sebanyak 11 (39.29%) inovasi. Sedangkan 6 (21.43%) inovasi lainnya berbentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

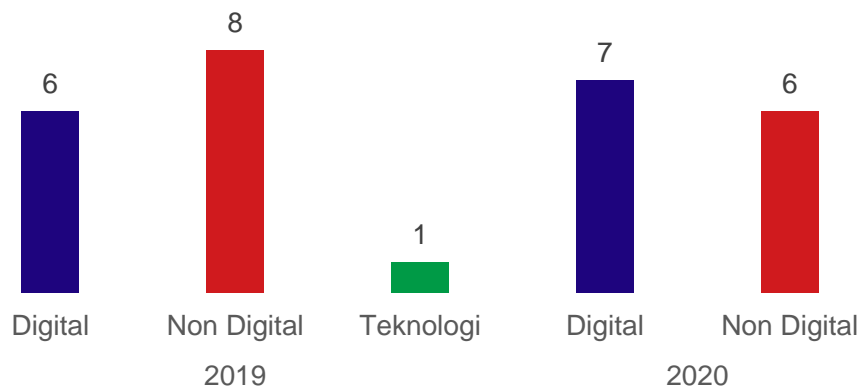
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 16. Diagram Inovasi Kab. Gunung Kidul berdasarkan Jenis Inovasi

Berdasarkan jenis inovasi, 14 (50.00%) inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Bantul berjenis Inovasi Non-Digital. Selanjutnya, 13 (46.43%) inovasi merupakan Inovasi Digital, dan 1 (3.57%) inovasi merupakan Inovasi Teknologi.

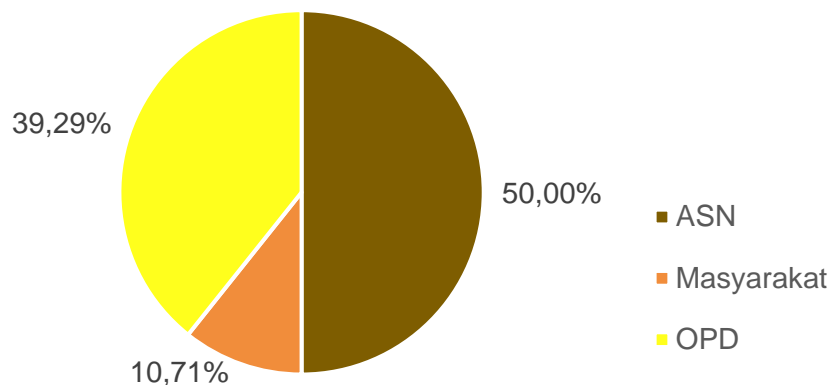
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Gunung Kidul

Berdasarkan progres jumlah inovasi berdasarkan tahun dan dikaitkan dengan jenis inovasi, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan pada jenis Inovasi Digital, namun terjadi penurunan pada Inovasi Non Digital dan Inovasi Teknologi. Jumlah Inovasi Digital pada tahun 2019 yaitu sebanyak 6 inovasi dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 7 inovasi, jumlah Inovasi Non Digital pada tahun 2019 yaitu sebanyak 8 inovasi namun menurun pada tahun 2020 menjadi 6 inovasi, dan jumlah Inovasi Tekonologi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1 inovasi namun menurun pada tahun 2020 menjadi 0 inovasi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



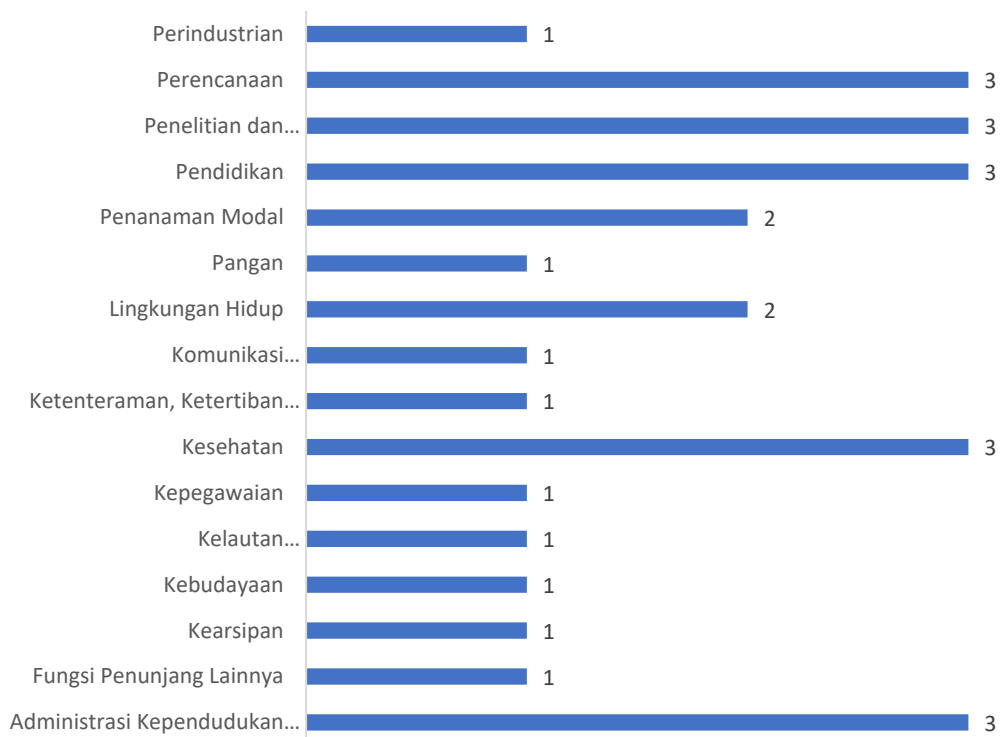
Gambar 18. Diagram Inovasi Kab. Gunung Kidul berdasarkan Inisiator Inovasi

Berdasarkan inisiator inovasi, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Gunung Kidul pada umumnya merupakan inisiasi oleh ASN dengan jumlah 14 (50.00%) inovasi. Selanjutnya, 11 (39.29%) inovasi diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah dan 3 (10.71%) inovasi lainnya diinisiasi oleh Masyarakat.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

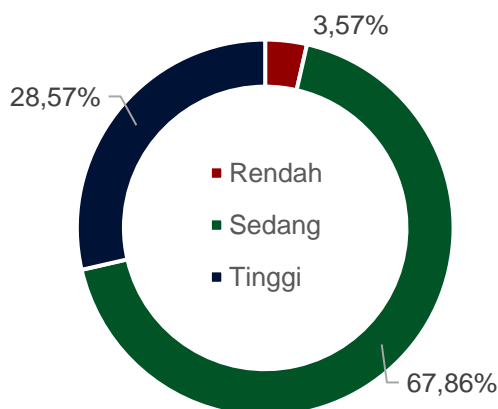
Sebaran inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan urusan pemerintahan sangat beragam baik Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar (Wajib – Pelayanan Dasar), Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Wajib – Non Pelayanan Dasar), serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Dari 6 Urusan Wajib – Pelayanan Dasar, inovasi yang dilaporkan Pemda Kabupaten Gunung Kidul tersebar pada 3 urusan yaitu urusan Pendidikan, urusan Kesehatan dan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (trantibumlinmas) dengan sebaran inovasi tertinggi terdapat pada urusan Pendidikan dan urusan Kesehatan dengan jumlah inovasi masing-masing sebanyak 3 inovasi. Pada Urusan Wajib – Non Pelayanan Dasar, inovasi sebaran inovasi tertinggi terdapat pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindikcapil) dengan jumlah inovasi sebanyak 3 inovasi. Pada Urusan Pilihan, sebaran inovasi tertinggi terdapat pada urusan Parindustrian dan urusan Kelautan dan Perikanan dengan jumlah inovasi masing-masing sebanyak 1 inovasi.

Sedangkan jika tanpa melihat batasan urusan, 3 urusan yang memiliki sebaran inovasi tertinggi yaitu urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, urusan Admindikcapil, urusan Perencanaan, dan urusan Penelitian dan Pengembangan dengan dengan jumlah inovasi masing-masing sebanyak 3 inovasi. Rincian sebaran inovasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 19. Grafik Sebaran Urusan Inovasi Kab. Gunung Kidul

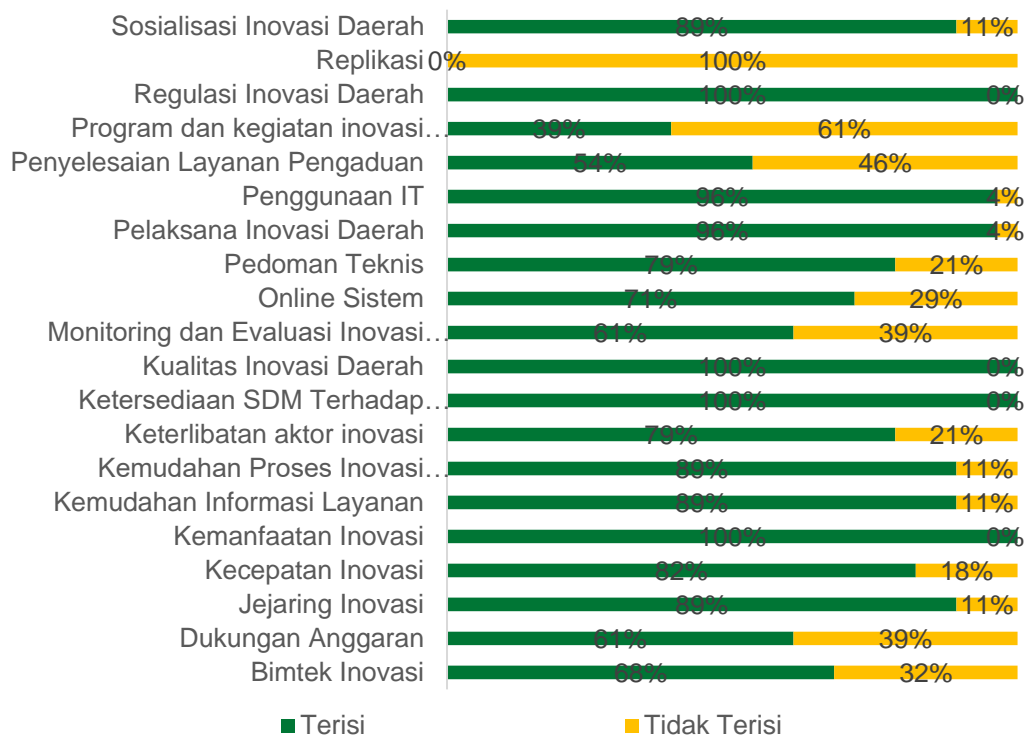
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 20. Diagram Inovasi Kab. Gunung Kidul berdasarkan Skor Kematangan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi Kabupaten Gunung Kidul pada umumnya memiliki skor kematangan sedang (antara 50-100) sebanyak sebanyak 19 (67.86%) inovasi. Selanjutnya, terdapat 8 (28.57%) inovasi dengan skor kematangan tinggi dan 1 (3.57%) inovasi dengan skor kematangan rendah.

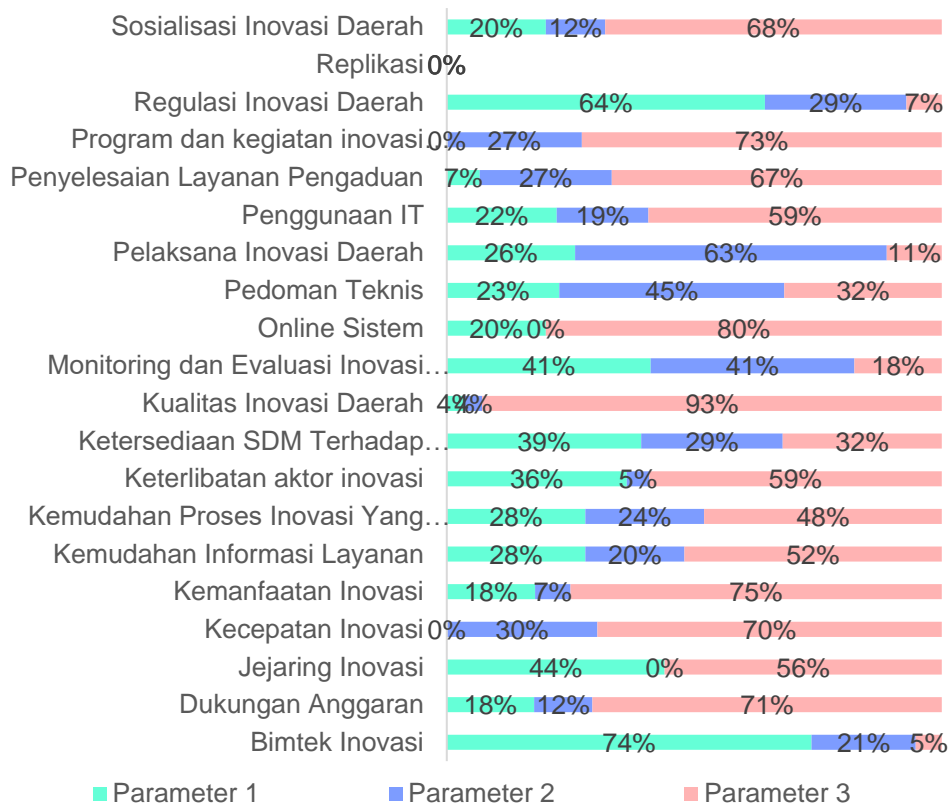
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Dukung dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Gunung Kidul

Dari 28 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Gunung Kidul, diperoleh rata-rata keterisian data dukung pada indikator satuan inovasi yaitu 77.14%, sedangkan 22.86% lainnya tidak dilengkapi dengan data dukung. Indikator yang memiliki tingkat keterisian data dukung tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi, Kualitas Inovasi, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi, dan Kemanfaatan Inovasi dengan tingkat keterisian sebesar 100%. Sedangkan indikator yang memiliki tingkat keterisian data dukung terendah adalah indikator Replikasi dengan tingkat keterisian hanya 0% yang artinya seluruh inovasi yang dilaporkan tidak dilengkapi data dukung pada indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Gunung Kidul

Secara umum, indikator-indikator yang dilengkapi dengan data dukung pada satuan inovasi daerah Kabupaten Gunung Kidul terisi dengan Parameter 3 (48.74%). Selanjutnya, 25.57% terisi dengan Parameter 1 dan 20.69% terisi dengan Parameter 2. Berdasarkan gambar di atas, beberapa indikator yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter 3 adalah Indikator Kualitas Inovasi (93%), Online Sistem (80%), dan Kemanfaatan Inovasi (75%). Beberapa indikator yang sudah memiliki keterisian dominan di parameter 2 adalah indikator Pelaksana Inovasi (63%) dan Pedoman Teknis (45%). Adapun indikator yang memiliki keterisian dominan pada parameter 1 tertinggi adalah Bimtek Inovasi (100%) yang artinya seluruh inovasi yang dilaporkan telah memiliki data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

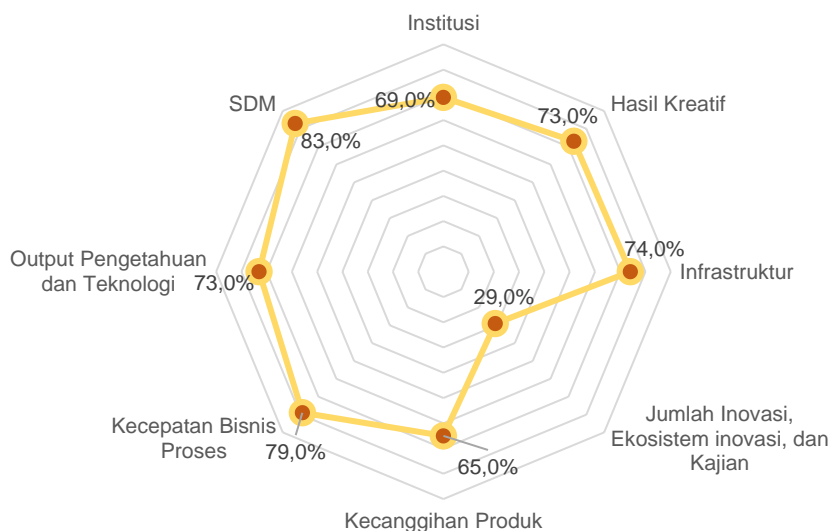
j. Daftar Inovasi Kab. Gunung Kidul beserta Skor Kematangannya (SK)

Tabel 3. Daftar Inovasi Kab. Gunung Kidul

NAMA INOVASI	SK
BLUEPRINT INVESTASI DPMPPT GUNUNGKIDUL	122
SIDA SAMEKTA	121
INOVASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	116
OPTIMALISASI KINERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOMUNIKSI DAN INFORMATIKA GUNUNGKIDUL	116
GATOT SEHAT	113

NAMA INOVASI	SK
PEKA LATIKA PRIMA	111
PROMKES PEMBatasan GULA 4 SDM/HARI DAN GARAM 1 SDT/HARI DI ANTRIAN PENGUNJUNG TINGKATKAN PENGETAHUAN DIABETES MELLITUS DAN HIPERTENSI	110
SI HITAM MANIS SALAH SATU SOLUSI MENUJU GREEN HOSPITAL	100
SIPANJANG (SISTEM PELAYANAN SAMPAI KE RANJANG) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGGKIDUL, YOGYAKARTA	99
SIMPEL (SISTEM PELAYANAN TERINTEGRASI) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL GUNUNGGKIDUL	96
PUSTAKA DIGITAL PEMBANGUNAN DAERAH	95
MOBILE KLINIK KONSULTASI KEMASAN	93
MOBSI (MOBILE PRESENSI)	90
PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN BIDANG KESEHATAN MELALUI SIDA SAMEKTA – SIKAB GUMREGAH (RATAKAN B'DAK SISKA) DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL	87
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP OLEH DLH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL	85
PROSES ALIH TEKNOLOGI SILASE BERBASIS HIJAUAN LOKAL DAN LIMBAH PERTANIAN DALAM RANGKA MENGATASI KELANGKAAN PAKAN	78
"RASANE VERA" GUNUNGGKIDUL	74
"SITATA KEREN" SISTEM PENGENDALIAN TATA KALA DAN TATA KELOLA KINERJA PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL	74
CEGAH DINI KONFLIK SOSIAL MELALUI JAGA WARGA DI TINGKAT DESA	73
PENGELOLAAN INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN (PENGEN SI HASAN)	72
EVALUASI DIRI SEKOLAH	71
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL	64
PERCEPATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PADA SEKDA KAB GUNUNGGKIDUL	62
PENGEMBANGAN "BOLU BAPER" (BONEKA MOLEKUL BERBAHAN KAIN PERCA)	59
PIPA MULTIFUNGSI UNTUK MEDIA PEMBELAJARAN OLAAHRAGA	56
PEMANFAATAN AIR BERKELANJUTAN UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA DENGAN MEMAKSIMALKAN PEMANFAATAN PEKARANGAN	54
PEMBUATAN DEMUNG , SARON DAN PEKING DARI KAYU NANGKA SEBAGAI GAMELAN ALTERNATIF DI DUSUN SUMBER DESA CANDIREJO KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL	53
MESIN PEMBUAT JALA IKAN	47

C. KABUPATEN KULON PROGO



Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Kulon Progo

Berdasarkan diagram di atas, capaian skor tertinggi variabel Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kulon Progo yaitu variabel Sumber Daya Manusia dengan skor 83% yang dapat diartikan bahwa secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut sudah memiliki keterisian dominan pada parameter tertinggi (parameter 3 – persentase di atas 67%). Variabel lainnya yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter tertinggi yaitu variabel Kecepatan Bisnis Proses (79%), variabel Infrastruktur (74%), variabel Hasil Kreatif (73%), variabel Output Pengetahuan dan Teknologi (73%), dan variabel Institusi (69%).

Sedangkan variabel yang memiliki skor terendah yaitu variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian dengan skor 29% yang dapat diartikan bahwa secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut memiliki keterisian dominan pada parameter rendah (parameter 1 – persentase berada di bawah 33%). sedang (parameter 2 – persentase antara 33% s.d 66%). Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki variabel yang keterisian dominan pada parameter rendah (parameter 1 – persentase berada di bawah 33%). Variabel lainnya pada inovasi Kabupaten Kulon Progo memiliki keterisian dominan pada parameter sedang (parameter 2 – persentase berada di antara 33% - 67%).

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 24. Grafik Capaian Aspek SPD Kab. Kulon Progo

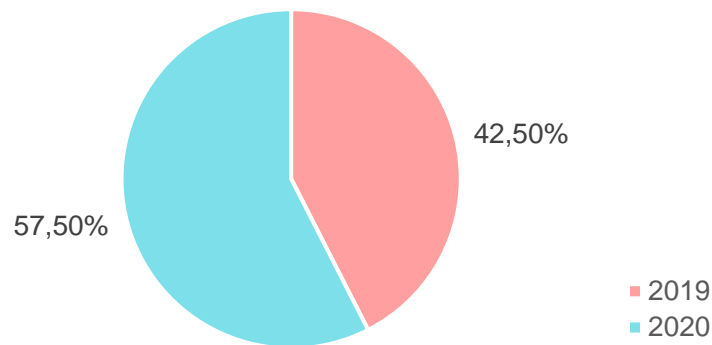
Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Kulon Progo. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data tahun 2019. Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi perbaikan pada beberapa Indikator. Indikator Kualitas Perizinan menjadi indikator yang mengalami peningkatan paling signifikan yaitu 60.67%. Indikator Jumlah PAD meningkat 6.96%, dan Nilai IPM meningkat 0.02%. Namun, perbaikan yang terjadi pada Indikator Jumlah PAD masih berada di bawah standar nasional yaitu naik 8.00%.

Sedangkan indikator yang tidak mengalami perbaikan signifikan yaitu Indikator Jumlah Investasi yang menurun 82.65%, Jumlah Pendapatan Perkapita yang turun 5.55%, Tingkat Pengangguran Terbuka turun 1.91% yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 1.91% dibandingkan tahun 2019, dan Penurunan Angka Kemiskinan yang turun 0.62% yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 0.62% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, indikator yang memerlukan perbaikan adalah Indikator Jumlah Investasi, Jumlah Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Penurunan Angka Kemiskinan yang disebabkan adanya penurunan progres dan indikator Jumlah PAD yang disebabkan oleh nilai progres indikator tersebut masih berada di bawah standar nasional.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

Pada tahun 2019 dan 2020, tercatat 40 satuan inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kab. Kulon Progo dengan rincian sebagaimana berikut:

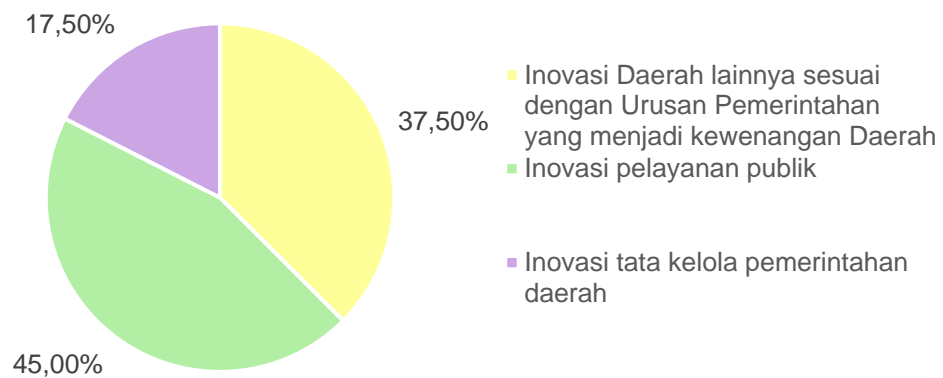
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25. Diagram Inovasi Kab. Kulon Progo berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

Berdasarkan tahun penerapan, inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Kulon Progo pada umumnya telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat sebanyak 17 (42.50%) inovasi diterapkan pada tahun 2019 dan sebanyak 23 (57.50%) inovasi diterapkan pada tahun 2020.

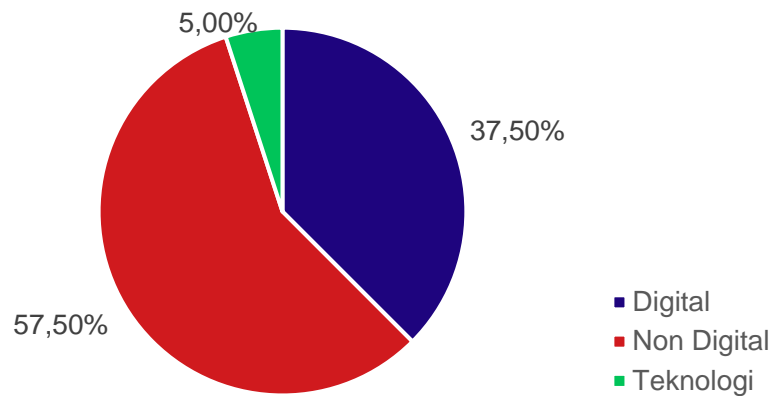
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 26. Diagram Inovasi Kab. Kulon Progo berdasarkan Bentuk Inovasi

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Kulon Progo pada umumnya berbentuk Inovasi Pelayanan Publik 18 (45.00%) inovasi. Selanjutnya, bentuk Inovasi Daerah Lainnya sebanyak 15 (37.50%) inovasi, dan 7 (17.50%) merupakan inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

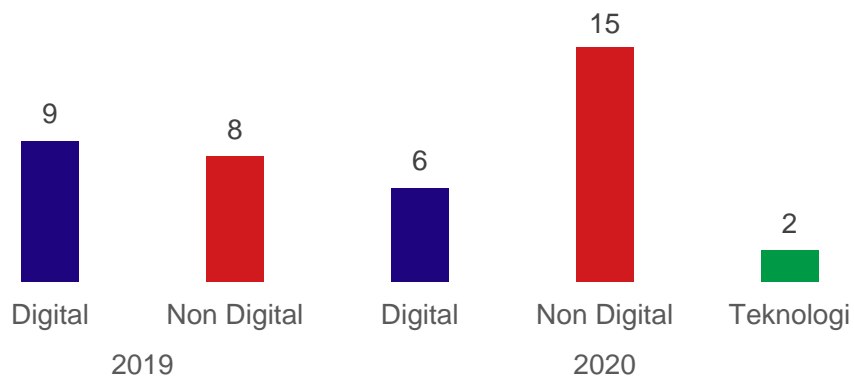
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 27. Diagram Inovasi Kab. Kulon Progo berdasarkan Jenis Inovasi

Berdasarkan jenis inovasi, 23 (57.50%) inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Kulon Progo berjenis Inovasi Non Digital. Selanjutnya, 15 (37.50%) inovasi merupakan Inovasi Digital, dan 2 (5.00%) inovasi merupakan Inovasi Teknologi.

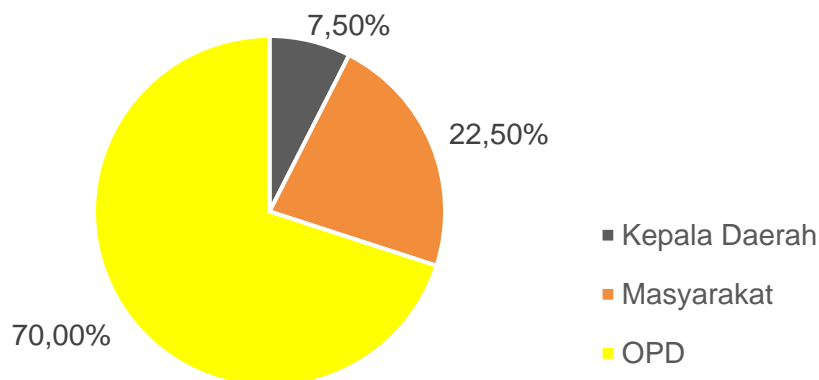
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Kulon Progo

Berdasarkan progres jumlah inovasi berdasarkan tahun dan dikaitkan dengan jenis inovasi, dapat dilihat terjadi penurunan pada jenis Inovasi Digital serta terjadi kenaikan pada jenis Inovasi Non Digital dan Inovasi Teknologi. Jumlah Inovasi Digital pada tahun 2019 yaitu sebanyak 9 inovasi dan menurun pada tahun 2020 menjadi 6 inovasi. Selanjutnya, jumlah Inovasi Non-Digital pada tahun 2019 yaitu sebanyak 8 inovasi dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 15 inovasi, sedangkan jumlah Inovasi Teknologi yang semula tidak ada di 2019 meningkat pada tahun 2020 menjadi 2 inovasi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



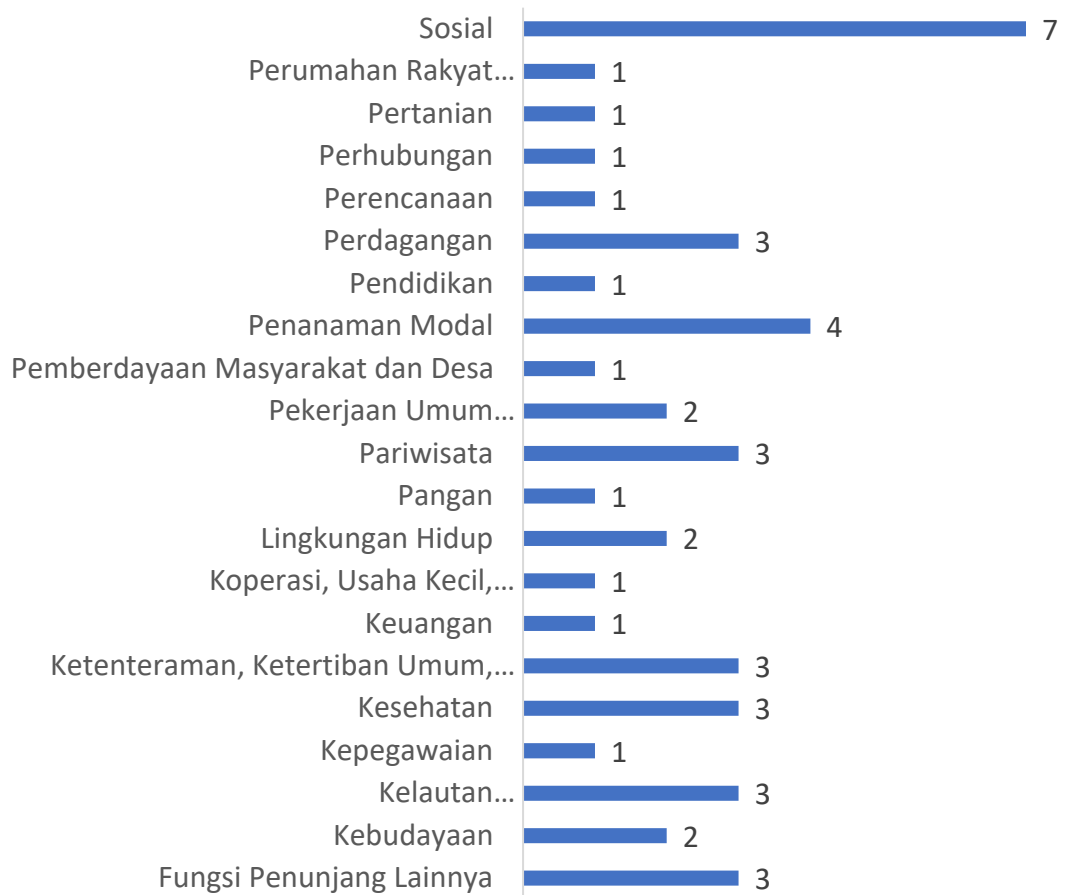
Gambar 29. Diagram Inovasi Kab. Kulon Progo berdasarkan Inisiator Inovasi

Berdasarkan inisiator inovasi, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Kulon Progo pada umumnya merupakan inisiasi secara kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dengan jumlah 28 (70.00%) inovasi. Selanjutnya, inisiasi inovasi lainnya diperoleh dari Masyarakat sebanyak 9 (22.50%), dan 3 (7.50%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

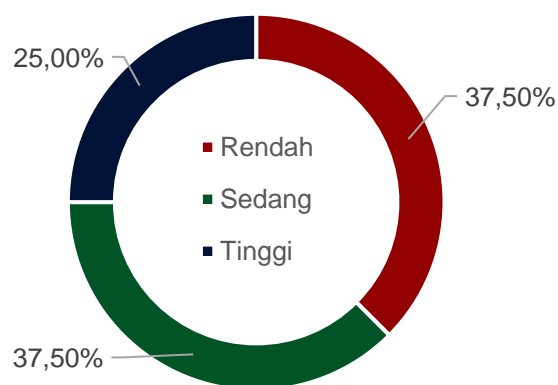
Sebaran inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Kulon Progo berdasarkan urusan pemerintahan sangat beragam baik Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar (Wajib – Pelayanan Dasar), Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Wajib – Non Pelayanan Dasar), serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Dari 6 Urusan Wajib – Pelayanan Dasar, inovasi yang dilaporkan Pemda Kabupaten Kulon Progo tersebar pada semua urusan tersebut dengan sebaran inovasi tertinggi terdapat pada urusan Sosial dengan jumlah inovasi sebanyak 7 inovasi. Pada Urusan Wajib – Non Pelayanan Dasar, inovasi sebaran inovasi tertinggi terdapat pada urusan Penanaman Modal dengan jumlah inovasi sebanyak 4 inovasi. Pada Urusan Pilihan, sebaran inovasi tertinggi terdapat pada urusan Pariwisata dan urusan Kelautan dan Perikanan dengan jumlah inovasi masing-masing sebanyak 3 inovasi.

Sedangkan jika tanpa melihat batasan urusan, 3 urusan yang memiliki sebaran inovasi tertinggi yaitu urusan Sosial dengan jumlah inovasi sebanyak 7 Inovasi, urusan Penanaman Modal sebanyak 4 Inovasi, serta urusan Perdagangan, urusan Pariwisata, urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, urusan Kesehatan, urusan Kelautan dan Perikanan, dan urusan Fungsi Penunjang Lainnya dengan jumlah inovasi masing- masing sebanyak 3 Inovasi. Rincian sebaran inovasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 30. Grafik Sebaran Urusan Inovasi Kab. Kulon Progo

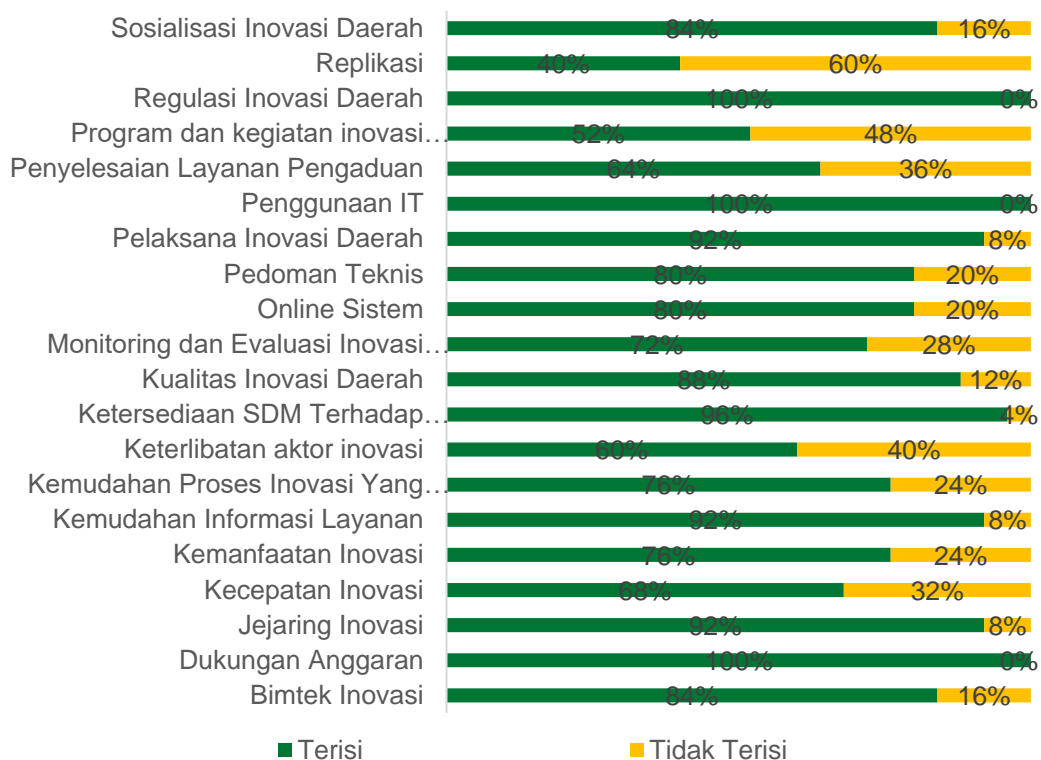
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 31. Diagram Inovasi Kab. Kulon Progo berdasarkan Skor Kematangan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi Kabupaten Kulon Progo pada umumnya memiliki skor kematangan sedang (antara 50-100) sebanyak 15 (37.50%) inovasi. Selanjutnya, terdapat 15 (37.50%) inovasi dengan skor kematangan rendah dan 10 (25.00%) inovasi dengan skor kematangan tinggi.

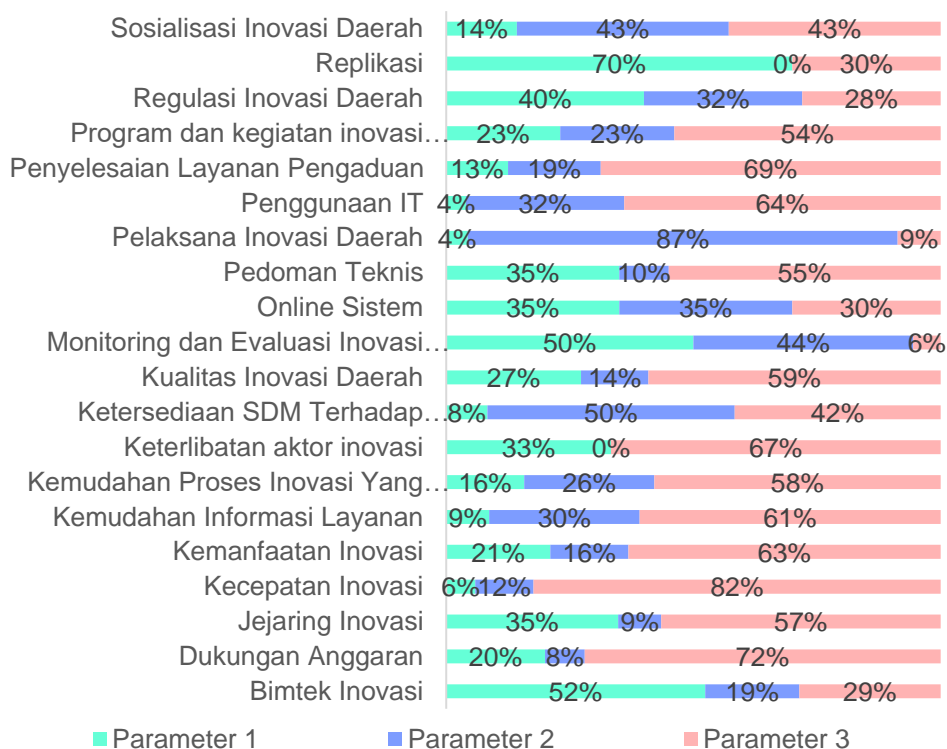
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Dukung Dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Kulon Progo

Dari 40 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kulon Progo diperoleh rata-rata keterisian data dukung pada indikator satuan inovasi yaitu 79.80%, sedangkan 20.20% lainnya tidak dilengkapi dengan data dukung. Indikator yang memiliki tingkat keterisian data dukung tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi, indikator Penggunaan IT dan indikator Dukungan Anggaran dengan tingkat keterisian sebesar 100%. Sedangkan indikator yang memiliki tingkat keterisian data dukung terendah adalah indikator Replikasi dengan tingkat keterisian hanya 40% yang artinya 60% dari inovasi yang dilaporkan tidak dilengkapi data dukung pada indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Kulon Progo

Secara umum, indikator-indikator yang dilengkapi dengan data dukung pada satuan inovasi daerah Kabupaten Kulon Progo terisi dengan Parameter 3 (48.77%). Selanjutnya, 25.79% terisi dengan Parameter 1 dan 25.44% terisi dengan Parameter 2. Berdasarkan gambar di atas, beberapa indikator yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter 3 adalah indikator Kecepatan Inovasi (82%), Dukungan Anggaran (72%), dan Penyelesaian Pengaduan (69%). Beberapa indikator yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter 2 adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah (87%), Ketersediaan SDM (50%), dan Monev Inovasi (44%). Adapun indikator yang memiliki keterisian dominan pada parameter 1 tertinggi adalah indikator Replikasi (70%) yang artinya 70% inovasi yang dilaporkan telah memiliki data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

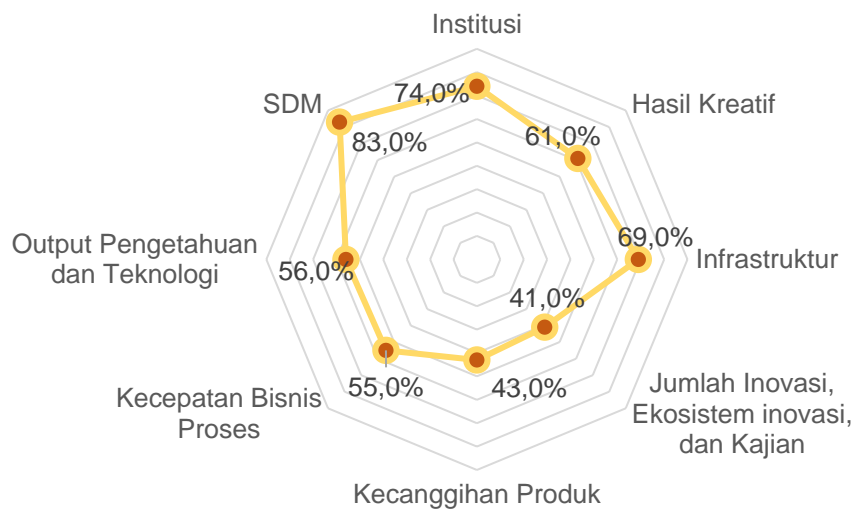
j. Daftar Inovasi Kab. Kulon Progo beserta Skor Kematangannya (SK)

Tabel 4. Daftar Inovasi Kab. Kulon Progo

NAMA INOVASI	SK
SIMASNEG (INTEGRASI E-PRESENSI DAN E-TPP)	139
SERBU IKANKU	123
TUAN NONAKU (BANTUAN PANGAN NON TUNAI APBD KABUPATEN KULON PROGO)	119
BUMILKU	118
DAYA INDRA	116

NAMA INOVASI	SK
SIMOKU	115
SICANTIKKU	113
POJOK KOPI-KU (POJOK KONSULTASI PENGAWASAN INTERN KULON PROGO)	113
TANIKU	111
JAKONKU (TIDAK MEMENUHI 5 INDIKATOR MANDATORI)	102
APLIKASI JAKON-KU	97
PKBM NGUDI KAWRUH GULUREJO LENDAH	96
PERI JEMPOL BOSS	95
KAMPUNG KOMPOSTER	93
JARAN SEKSI (JATHILAN GARAPAN SENI KLASIK DAN KREASI)	91
SEPAKAT (SEKARANG BAYAR PAJAK LEBIH DEKAT)	90
SI PENTAS JAWARAKU (SISTEM PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN KALURAHAN DI KULON PROGO)	90
NEW NORMAL LIFE MPP	85
SIBAKU (SISTEM INFORMASI BANK SAMPAH KULON PROGO)	85
PERMAK (PELAYANAN RAMAH ANAK)	80
SIMBANGKU (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK USAHA BERSAMA)	75
OMPLONGKU	74
TARUNA AGNI KABUPATEN KULON PROGO <DELETE>	71
LITERASI INVESTASI	66
BPNT APBD	51
SIMBANGKU <DELETE>	49
RENCANAKU 2.0	45
SIPELURU JAMESBON (SISTEM PELAYANAN RUJUKAN JAMINAN KESEHATAN SOSIAL BERBASIS ONLINE)	35
TOMIKU	27
NEW NORMAL LIFE PELAYANAN HOTEL	15
NEW NORMAL LIFE PKB	15
NEW NORMAL LIFE PASAR MODERN DAN TOMIRA	12
NEW NORMAL LIFE KULINER	12
NEW NORMAL LIFE DESTINASI WISATA	12
SENAM ANGGUK KULON PROGO	12
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO	12
TIPIRING ONLINE	12
KAWASAN SETRA INDUSTRI PERIKANAN AIR TAWAR DESA KRANGGAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO	12
SID KU (SISTEM INFORMASI DESA KULONPROGO)	12
NEW NORMAL LIFE PASAR DAERAH	8

D. KABUPATEN SLEMAN

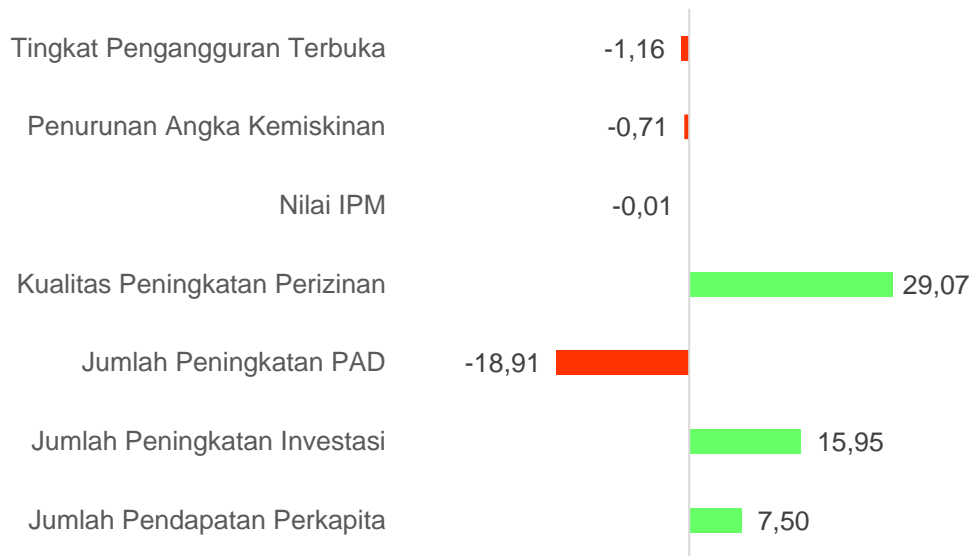


Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Sleman

Berdasarkan diagram di atas, capaian skor tertinggi variabel Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sleman yaitu variabel Sumber Daya Manusia dengan skor 83% yang dapat diartikan bahwa secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut sudah memiliki keterisian dominan pada parameter tertinggi (parameter 3 – persentase di atas 67%). Variabel lainnya yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter tertinggi yaitu variabel Institusi (74%), dan variabel Infrastruktur (69%).

Sedangkan variabel yang memiliki skor terendah yaitu variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian dengan skor 41% yang dapat diartikan bahwa secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut memiliki keterisian dominan pada parameter sedang (parameter 2 – persentase berada di antara 33% - 67%). Kabupaten Sleman tidak memiliki variabel yang memiliki keterisian dominan pada parameter rendah (parameter 1 – persentase di bawah 33%).

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 35. Grafik Capaian Aspek SPD Kab. Sleman

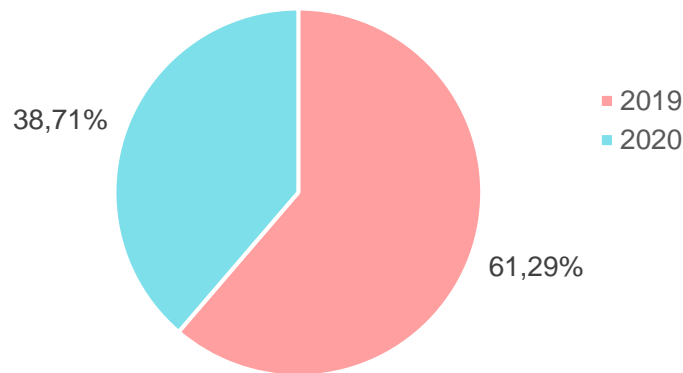
Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Sleman. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data tahun 2019. Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi perbaikan pada beberapa indikator. Indikator Kualitas Perizinan menjadi indikator yang mengalami peningkatan yang paling signifikan yaitu 29.07%. Indikator Jumlah Investasi meningkat 15.95%, dan Jumlah Pendapatan Perkapita meningkat 7.50%.

Sedangkan indikator yang belum mengalami perbaikan signifikan yaitu Jumlah PAD yang menurun 18.91%, Tingkat Pengangguran Terbuka turun 1.16% yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 1.16% dibandingkan tahun 2019, Penurunan Angka Kemiskinan turun 0.17% yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 0.17% dibandingkan tahun sebelumnya., dan nilai IPM turun 0.01%. Berdasarkan uraian di atas, indikator yang memerlukan perbaikan adalah Jumlah PAD, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM yang disebabkan adanya penurunan progres.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

Pada tahun 2019 dan 2020, tercatat 62 satuan inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kab. Sleman dengan rincian sebagaimana berikut:

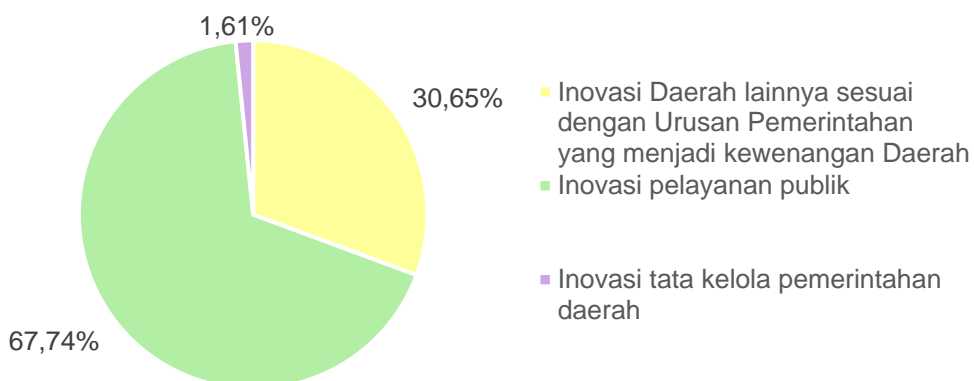
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 36. Diagram Inovasi Kab. Sleman berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

Berdasarkan tahun penerapan, inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Sleman pada umumnya diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat sebanyak 38 (61.29%) inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 dan 24 (38.71%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

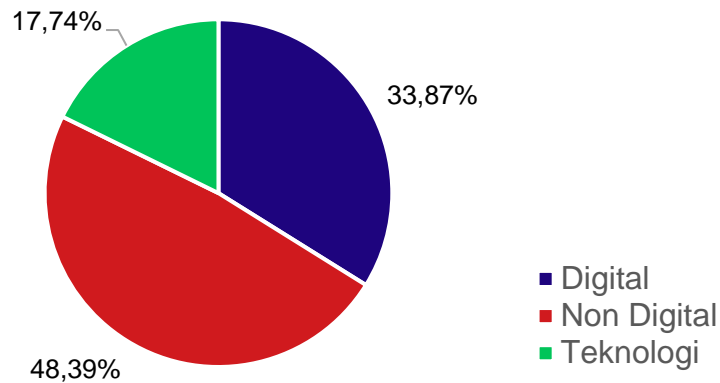
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 37. Diagram Inovasi Kab. Sleman berdasarkan Bentuk Inovasi

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sleman pada umumnya berbentuk Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 42 (67.74%) inovasi. Selanjutnya, bentuk Inovasi Daerah Lainnya sebanyak 19 (30.65%) inovasi, dan 1 (1.61%) inovasi lainnya berbentuk inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

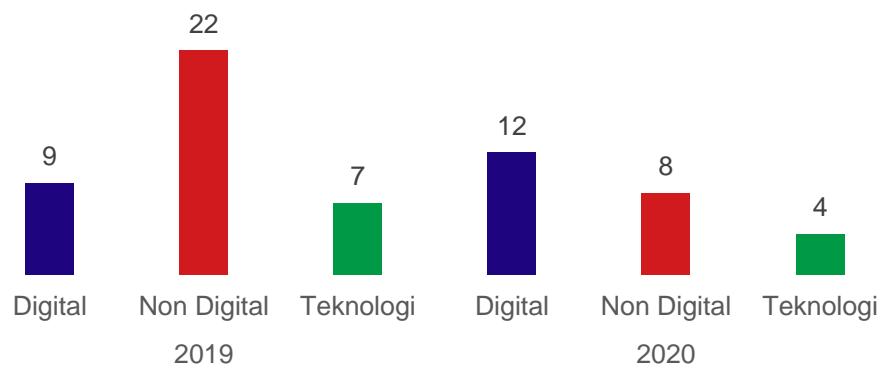
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 38. Diagram Inovasi Kab. Sleman berdasarkan Jenis Inovasi

Berdasarkan jenis inovasi, 30 (48.39%) inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Sleman berjenis Inovasi Non Digital. Selanjutnya, 21 (33.87%) inovasi merupakan Inovasi Digital, dan 11 (17.74%) inovasi lainnya merupakan Inovasi Teknologi.

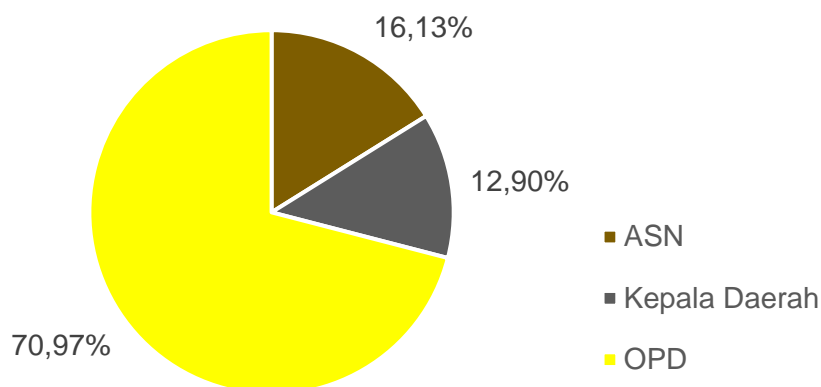
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Sleman

Berdasarkan progres jumlah inovasi berdasarkan tahun dan dikaitkan dengan jenis inovasi, dapat dilihat terjadi peningkatan pada jenis Inovasi Digital, namun terjadi penurunan pada jenis Inovasi Non Digital dan jenis Inovasi Teknologi. Jumlah Inovasi Digital pada tahun 2019 yaitu sebanyak 9 inovasi dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 12 inovasi. Sedangkan jumlah Inovasi Non Digital pada tahun 2019 yaitu sebanyak 22 inovasi dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 8 inovasi dan jumlah Inovasi Teknologi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 7 inovasi namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 4 inovasi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



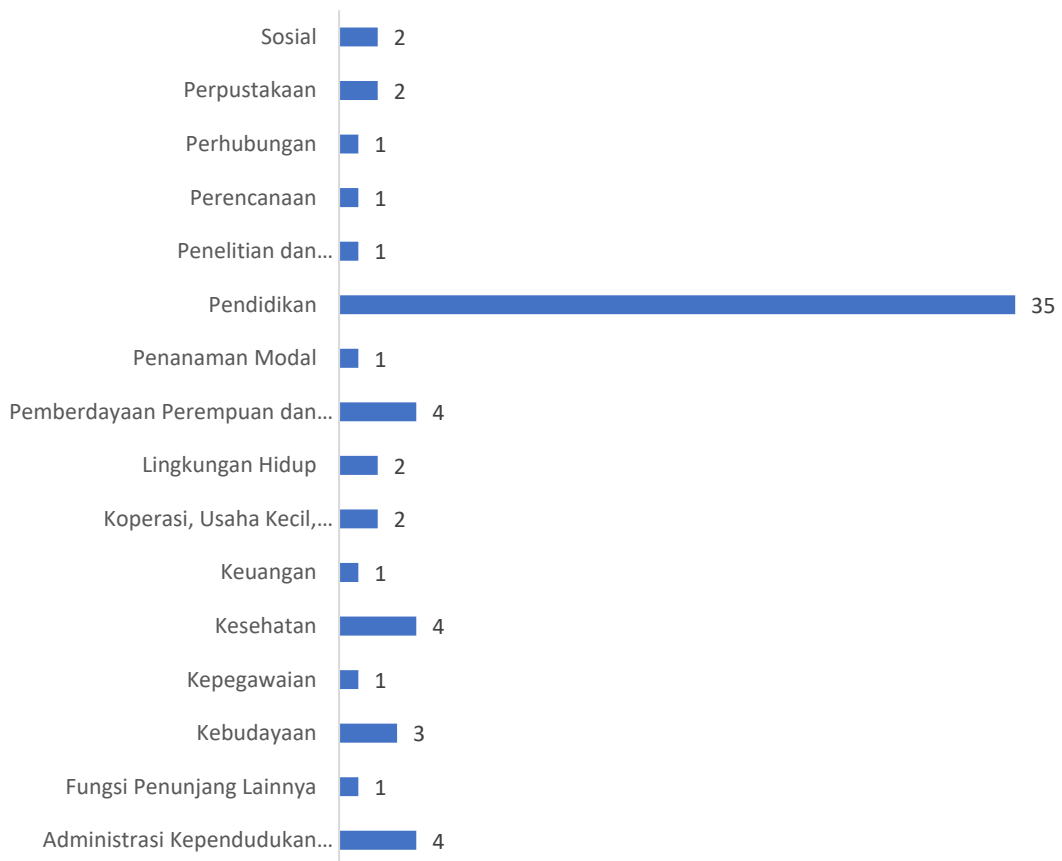
Gambar 40. Diagram Inovasi Kab. Sleman berdasarkan Inisiator Inovasi

Berdasarkan inisiator inovasi, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Sleman pada umumnya merupakan inisiasi secara kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dengan jumlah 44 (70.97%) inovasi. Selanjutnya, inisiasi inovasi lainnya diperoleh dari ASN sebanyak 10 (16.13%) inovasi, dan 8 (12.90%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

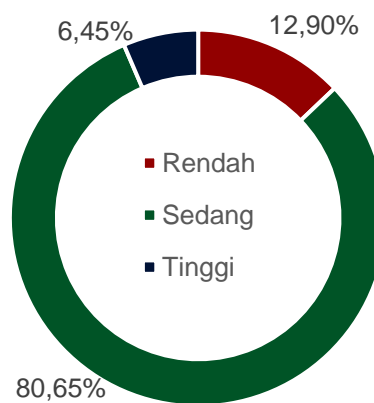
Sebaran inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kabupaten Sleman berdasarkan urusan pemerintahan sangat beragam baik Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar (Wajib – Pelayanan Dasar), Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Wajib – Non Pelayanan Dasar), namun tidak ada sebaran pada Urusan Pemerintahan Pilihan. Dari 6 Urusan Wajib – Pelayanan Dasar, inovasi yang dilaporkan Pemda Kabupaten Sleman tersebar 3 urusan yaitu urusan Sosial, urusan Kesehatan, dan urusan Pendidikan dengan sebaran inovasi tertinggi terdapat pada urusan Pendidikan dengan jumlah inovasi sebanyak 35 inovasi. Pada Urusan Wajib – Non Pelayanan Dasar, inovasi sebaran inovasi tertinggi terdapat pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) dan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminkapil) dengan jumlah inovasi masing-masing sebanyak 4 inovasi.

Sedangkan jika tanpa melihat batasan urusan, 3 urusan yang memiliki sebaran inovasi tertinggi yaitu urusan Pendidikan dengan jumlah inovasi sebanyak 35 inovasi, urusan PPPA sebanyak 4 inovasi, serta urusan Adminkapil sebanyak 4 inovasi. Rincian sebaran inovasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 41. Grafik Sebaran Urusan Inovasi Kab. Sleman

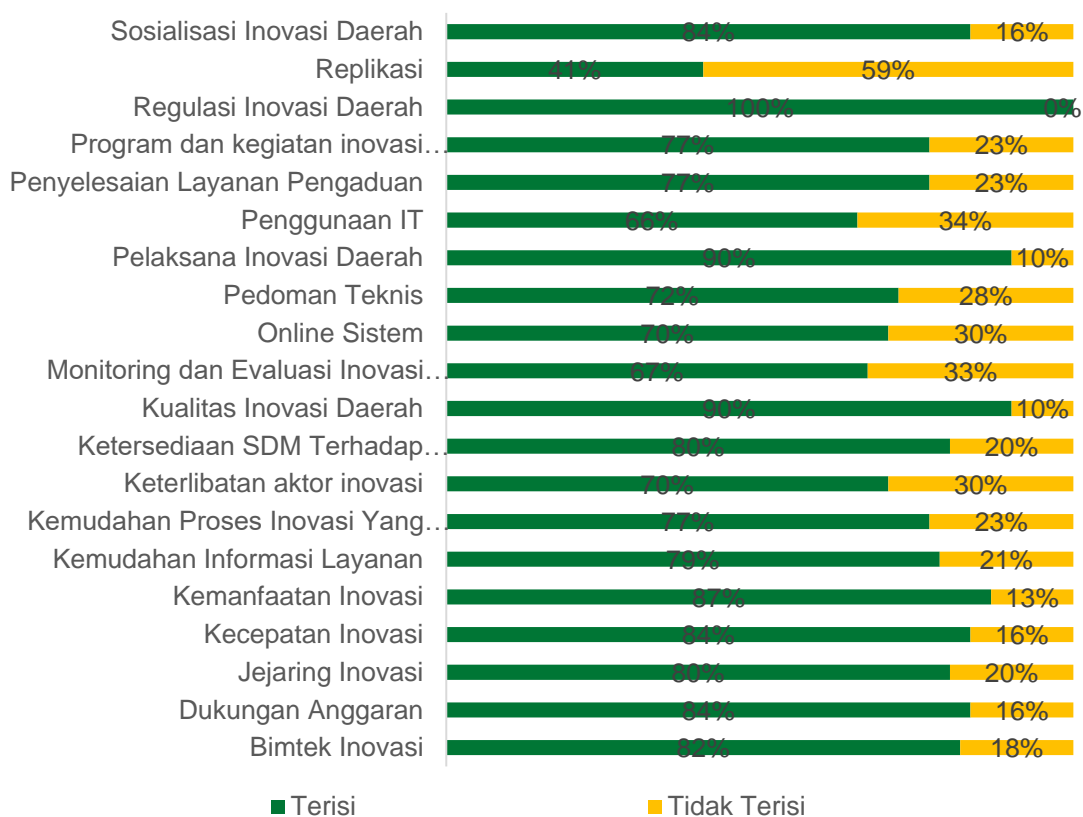
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 42. Diagram Inovasi Kab. Sleman berdasarkan Skor Kematangan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi Kabupaten Sleman pada umumnya memiliki skor kematangan sedang (antara 50-100) sebanyak 50 (80.65%) inovasi. Selanjutnya, terdapat 8 (12.90%) inovasi dengan skor kematangan rendah dan 4 inovasi (6.45%) dengan skor kematangan tinggi.

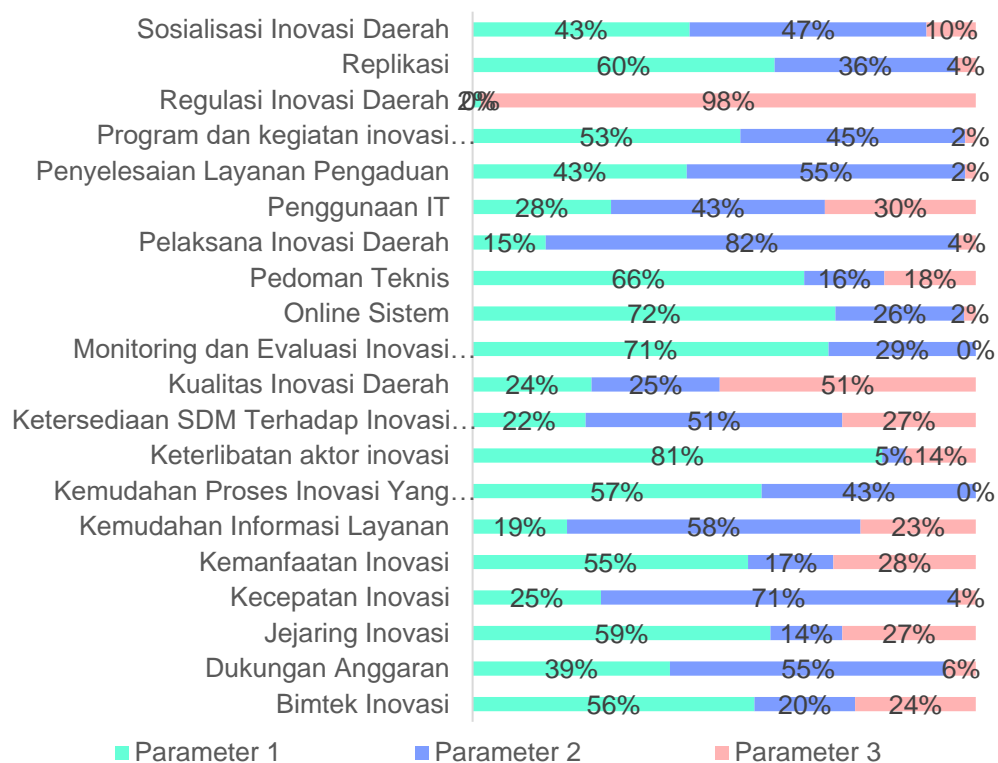
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Dukung Dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Sleman

Dari 62 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sleman diperoleh rata-rata keterisian data dukung pada indikator satuan inovasi yaitu 77.87%, sedangkan 22.13% lainnya tidak dilengkapi dengan data dukung. Indikator yang memiliki tingkat keterisian data dukung tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi dengan tingkat keterisian sebesar 100%. Sedangkan indikator yang memiliki tingkat keterisian data dukung terendah adalah indikator Replikasi dengan tingkat keterisian hanya 41% yang artinya 59% dari inovasi yang dilaporkan tidak dilengkapi data dukung pada indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kab. Sleman

Secara umum, indikator-indikator yang dilengkapi dengan data pendukung pada satuan inovasi daerah Kabupaten Sleman terisi dengan Parameter 1 (44.48%). Selanjutnya, 36.85% terisi dengan Parameter 2 dan 18.68% terisi dengan Parameter 3. Berdasarkan gambar di atas, beberapa indikator yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter 3 adalah indikator Regulasi Inovasi (98%) dan Kualitas Inovasi (51%). Beberapa indikator yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter 2 adalah indikator Pelaksana Inovasi (82%), Kecepatan Inovasi (71%), dan Dukungan Anggaran (55%). Adapun indikator yang memiliki keterisian dominan pada parameter 1 tertinggi adalah indikator Online System (72%) yang artinya 72% inovasi yang dilaporkan telah memiliki data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kab. Sleman beserta Skor Kematangannya (SK)

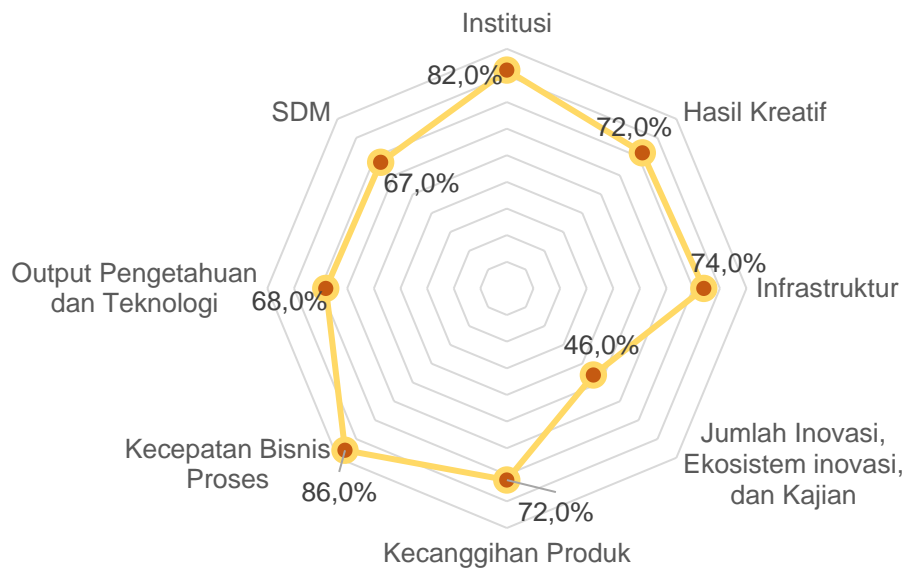
Tabel 5. Daftar Inovasi Kab. Sleman

NAMA INOVASI	SK
BINA INTAN BERLIAN (PEMBINAAN INTENSIF ANAK BERBAKAT DAN PILIHAN) SD ISLAM AL AZHAR 31 YOGYAKARTA	113
SINTA SP (SISTEM INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN)/CSR	112
PEPAK-SADAP (PETA PENDIDIKAN DALAM APLIKASI SATU DATA PENDIDIKAN) KABUPATEN SLEMAN	110

NAMA INOVASI	SK
SIM KIA (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN IBU DAN ANAK)	102
SLEMAN MART	99
PELAYANAN IZIN ONLINE KKN DI MASA PANDEMI	99
PPDB ONLINE	99
E-SIKS (ELEKTRONIK- SISTEM INFORMASI KEBUDAYAAN SLEMAN)	96
GALI CEKAT TUNTAS (GERAKAN LITERASI, SABTU CERDAS BERKARAKTER DAN SABTU ONLINE BERPRESTASI)	96
E-PRODA, E-PROCUREMENT DAERAH TERINTEGRASI	95
SISDATKU (SISTEM SATU DATA KUKM)	94
SISTEM INFORMASI PELAYANAN MUTASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH (PENYEMPURNAAN MAIP YANG TELAH ADA DAN DISEMPURNAKAN SECARA ONLINE)	94
STUDENT LED CONFERENCE	93
"SIK ASYIK STORY READING" DENGAN MEMBACA BUKU CERITA ANAK MENJADI ASYIK	92
GERAKAN SEKOLAH MENYENGGKAN (GSM) SD NEGERI BANYUREJO 2	91
LDR (LITERASI DI RUMAH)	91
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI METODE 3T (TONTON, TERKA, TERAPKAN) UNTUK PEMECAHAN SOAL TIPE HOTS	90
TRAINING CENTER KOMPETISI SAINS NASIONAL (KSN)	89
CATUR BUDAYA	88
LAYANAN SOSIAL SATU PINTU SLEMAN SEMBADA	86
BATMAN TERBANG TERUS / BANTU MASYARAKAT TERTIB BANGUNAN DAN TERTIB USAHA	86
ENGLISH FOR MATH AND SCIENCE (ETHIC)	86
ASYIKNYA GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN (GSM) DENGAN RANGKIANG LINGPOTIS	85
GOWES SAMR (PEMANFAATAN GOOGLE CLASSROOM TERINTEGRASI WEB SEKOLAH BERBASIS SAMR)	83
GELIAT SIGAP (GERAKAN LITERASI TUMBUHKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN)	82
SIPATEN (SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRAI TERPADU KECAMATAN)	81
GERABAH SI BABE (GERAKAN MENGOLAH LIMBAH SAMPAH MENJADI BARANG BERHARGA)	81
GURU BERSELERA (GURU BLOGGER-YOUTUBER, SEKOLAH LITERAT)	81
SEKOLAH RISET	81
GSM (GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN)	80
SPALD-T (SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT) SKALA KAWASAN BERBASIS WISATA EDUKASI	78
STUDENTS EXCHANGE (STUDEX)	77
SEMBADA BELAJAR	77
PATUT ONLINE	75
PAK TANI BASMI SUKET TEKI	74

NAMA INOVASI	SK
KADO UNTUK DILAN (KENDARAAN ANTAR DOKUMEN UNTUK DIFABEL LANSIA SERTA IBU HAMIL)	73
PRIYAYI (RSUD PRAMBANAN PEDULI PENYEHATAN IBU DAN BAYI)	72
BELA GA' TEJA PENDIKAR	72
SIAP BERGERAK KEREN (SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN BERSAMA DALAM GERAKAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN TERENCANA)	71
POLA ASUH PENDIDIKAN KARAKTER KELUARGA DUA PULUH DELAPAN (PASUKAN RAGA 28)	71
KISAH PENGETIK (KEBIJAKAN SEKOLAH PENILAIAN MENGGUNAKAN TIK)	71
SIKRESNO (SISTEM INFORMASI KENDARAAN REGISTRASI ONLINE)	70
PELITA (PEDULI LINGKUNGAN SEKITAR)	70
KREDIT PASAR	70
PEMBUATAN BAHAN AJAR DENGAN APLIKASI SCREENCAST O MATIC	69
POS PPA (POS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) BARAK PENGUNGSIAN	68
KELUARGA CERDIG (CERDAS DENGAN LITERASI DIGITAL)	68
SEKOLAH DIGITAL	68
PAPAN PERMAINAN 7 LEVEL WINS DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	67
BAMBANG DAN LARAS (MEMBANGKITKAN KEMBALI TEMBANG DOLANAN DAN PERMAINAN TRADISIONAL)	66
VIDEO PEMBELAJARAN : SAINS SEDERHANA	57
PENITI DARI RESTI (PENERAPAN LITERASI DALAM MERAHAI PRESTASI)	57
KELUARGA DAR DER (KELUARGA SADAR GENDER)	56
GERAKAN "REMEN" (REVOLUSI MENTAL) UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH BERBASIS WISATA	56
SISIR ADMINDUK (SOSIALISASI INFORMASI DAN REKAM DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)	49
SI WANDANSARI (SLEMAN INOVASI WISATA PUSTAKA DAN BUDAYA DAERAH BAGI ANAK NEGERI)	49
IKATAN CINTA (INDAHNYA KERJASAMA ALUMNI TANAMKAN AMANAH DAN CITA-CITA MENUJU INSAN YANG BERKARAKTER MULIA) SMP NEGERI 2 GODEAN	41
DENGAN POSDIG DAPAT MENINGKATKAN HASIL BELAJAR	36
MOVING CLASS TANPA JAM KOSONG	31
SI YOUMEET SEMANGATKU BELAJAR	27
PEMANFAATAN MEDIA CCTV UNTUK KETERTIBAN SISWA DALAM SHOLAT BERJAMAAH DI MUSHOLA SMPN 4 KALASAN	12
KREATIFITAS PEMBELAJARAN	12

E. KOTA YOGYAKARTA

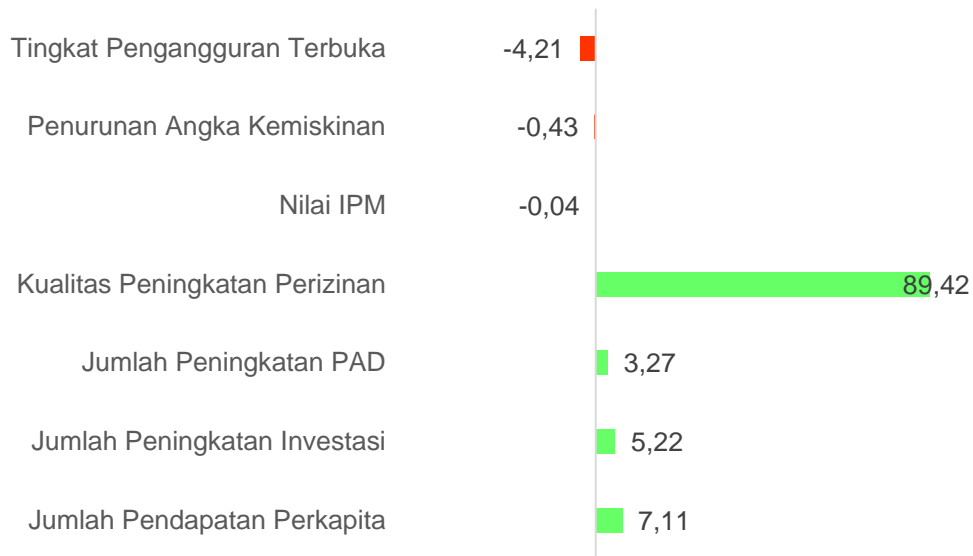


Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Yogyakarta

Berdasarkan diagram di atas, capaian skor tertinggi variabel Indeks Inovasi Daerah pada Kota Yogyakarta yaitu variabel Kecepatan Bisnis Proses dengan skor 86% yang dapat diartikan bahwa secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut sudah memiliki keterisian dominan pada parameter tertinggi (parameter 3 – persentase di atas 67%). Variabel lainnya yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter tertinggi yaitu variabel Institusi (82%), variabel Infrastruktur (74%), variabel Hasil Kreatif (72%), variabel Kecanggihan Produk (72%), variabel Output Pengetahuan dan Teknologi (68%), dan variabel Sumber Daya Manusia (67%).

Sedangkan variabel yang memiliki skor terendah yaitu variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian dengan skor 46% yang dapat diartikan bahwa secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut memiliki keterisian dominan pada parameter sedang (parameter 2 – persentase berada di antara 33% - 67%). Kota Yogyakarta tidak memiliki variabel dengan keterisian dominan pada parameter rendah (parameter 1 – persentase berada di bawah 33%).

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 46. Grafik Capaian Aspek SPD Kota Yogyakarta

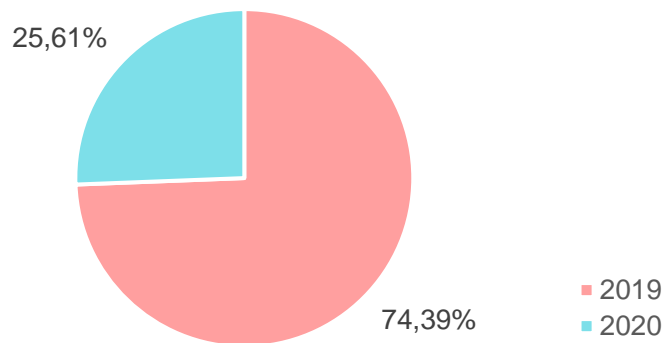
Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kota Yogyakarta. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data tahun 2019. Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi perbaikan pada beberapa Indikator. Indikator Kualitas Perizinan menjadi indikator yang mengalami peningkatan yang paling signifikan yaitu 89.42%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita meningkat 7.11%, Jumlah Investasi meningkat 5.22%, dan Jumlah PAD meningkat 3.27%. Namun, perbaikan yang terjadi pada Jumlah PAD masih berada di bawah standar nasional yaitu naik 8.00%.

Sedangkan indikator yang mengalami penurunan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka menurun 4.21% yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 4.21% dibandingkan tahun 2019, Penurunan Angka Kemiskinan turun 0.43% yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 0.43% dibandingkan tahun sebelumnya, dan Nilai IPM menurun 0.04%. Berdasarkan uraian di atas, indikator yang memerlukan perbaikan adalah Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan dan Nilai IPM yang disebabkan adanya penurunan progres serta Indikator Jumlah PAD yang disebabkan oleh nilai progres indikator tersebut masih berada di bawah standar nasional.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

Pada tahun 2019 dan 2020, tercatat 82 satuan inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kota Yogyakarta dengan rincian sebagaimana berikut:

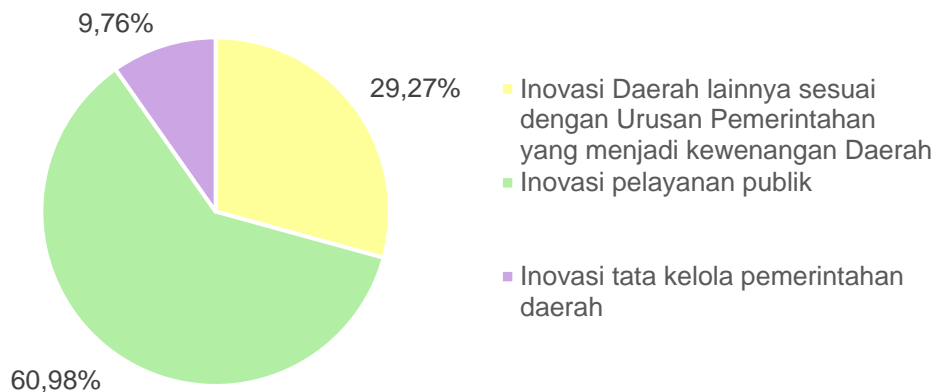
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47. Diagram Inovasi Kota Yogyakarta berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

Berdasarkan tahun penerapan, inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kota Yogyakarta pada umumnya telah diterapkan pada tahun 2019. Terdapat sebanyak 61 (74.39%) inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 dan 21 (25.61%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

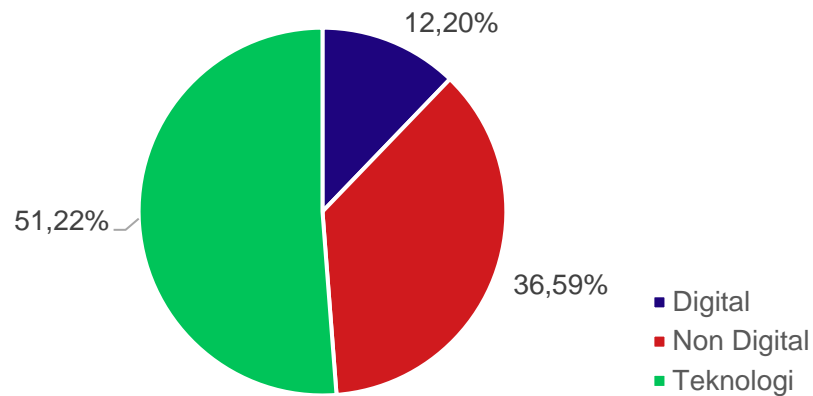
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 48. Diagram Inovasi Kota Yogyakarta berdasarkan Bentuk Inovasi

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kota Yogyakarta pada umumnya berbentuk Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 50 (60.98%) inovasi. Selanjutnya, bentuk Inovasi Daerah Lainnya sebanyak 24 (29.27%) inovasi, dan 8 (9.76%) inovasi lainnya berbentuk inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

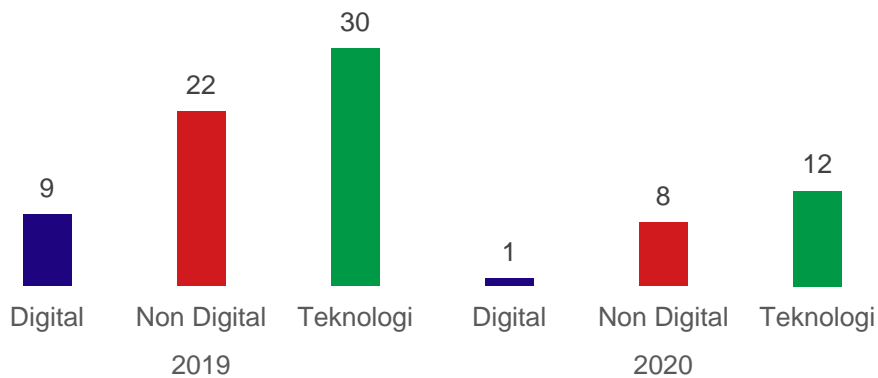
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 49. Diagram Inovasi Kota Yogyakarta berdasarkan Jenis Inovasi

Berdasarkan jenis inovasi, 42 (51.22%) inovasi yang dilaporkan oleh Pemda Kota Yogyakarta berjenis Inovasi Teknologi. Selanjutnya, 30 (36.59%) inovasi merupakan Inovasi Non Digital, dan 10 (12.20%) inovasi lainnya merupakan Inovasi Digital.

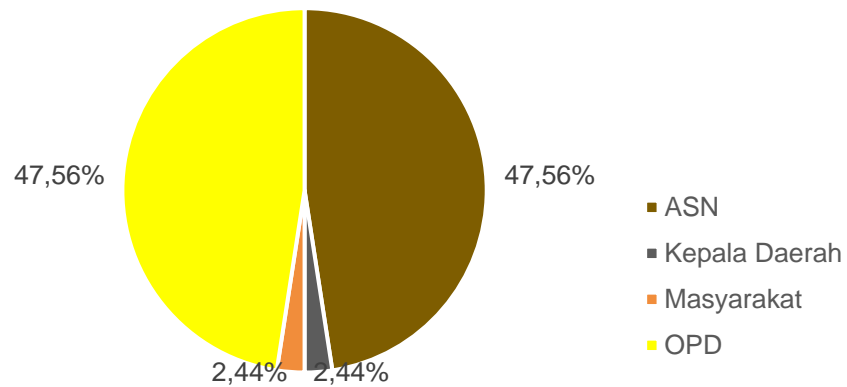
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Yogyakarta

Berdasarkan progres jumlah inovasi berdasarkan tahun dan dikaitkan dengan jenis inovasi, terjadi penurunan pada seluruh jenis inovasi baik Inovasi Digital, Inovasi Non Digital, dan Inovasi Teknologi. Jumlah Inovasi Digital pada tahun 2019 yaitu sebanyak 9 inovasi namun menurun pada tahun 2020 menjadi 1 inovasi, jumlah Inovasi Non Digital pada tahun 2019 yaitu sebanyak 22 inovasi namun menurun pada tahun 2020 menjadi 8 inovasi, dan jumlah Inovasi Teknologi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 30 inovasi namun menurun pada tahun 2020 menjadi 12 inovasi.

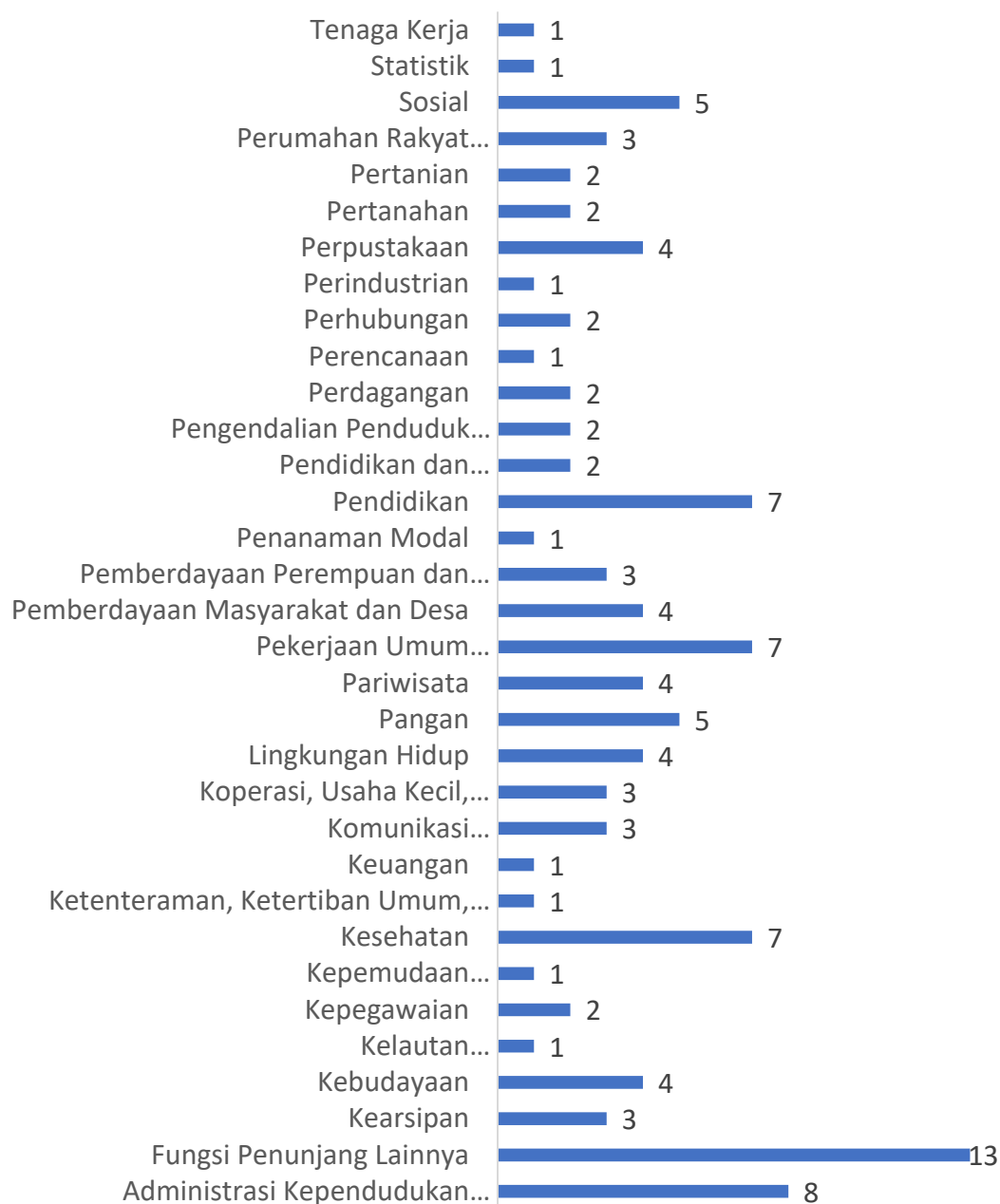
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 51. Diagram Inovasi Kota Yogyakarta berdasarkan Inisiator Inovasi

Berdasarkan inisiator inovasi, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kota Yogyakarta pada umumnya merupakan inisiasi secara kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dengan jumlah 39 (47.56%) inovasi. Selanjutnya, inisiasi inovasi lainnya diperoleh dari ASN sebanyak 39 (47.56%) inovasi, inisiasi dari Masyarakat sebanyak 2 (2.44%) inovasi dan 2 (2.44%) inovasi lainnya berasal dari Kepala Daerah.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



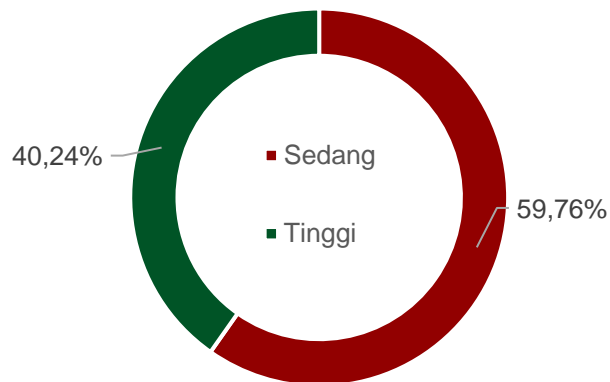
Gambar 52. Grafik Sebaran Urusan Inovasi Kota Yogyakarta

Sebaran inovasi daerah yang dilaporkan oleh Pemda Kota Yogyakarta berdasarkan urusan pemerintahan sangat beragam baik Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar (Wajib – Pelayanan Dasar), Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Wajib – Non Pelayanan Dasar), serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Dari 6 Urusan Wajib – Pelayanan Dasar, inovasi yang dilaporkan Pemda Kota Yogyakarta tersebar pada seluruh urusan tersebut dengan sebaran inovasi tertinggi terdapat pada urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, dan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan jumlah inovasi masing-masing sebanyak 7 inovasi. Pada Urusan Wajib – Non Pelayanan Dasar, inovasi sebaran inovasi tertinggi

terdapat pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindakapil) dengan jumlah inovasi sebanyak 8 inovasi. Pada Urusan Pilihan, sebaran inovasi tertinggi terdapat pada urusan Pariwisata dengan jumlah inovasi sebanyak 4 inovasi.

Sedangkan jika tanpa melihat batasan urusan, 3 urusan yang memiliki sebaran inovasi tertinggi yaitu urusan Fungsi Penunjang Lainnya dengan jumlah inovasi sebanyak 13 inovasi, urusan Admindak sebanyak 8 inovasi, serta urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, dan urusan PUPR dengan jumlah inovasi masing-masing sebanyak 7 inovasi.

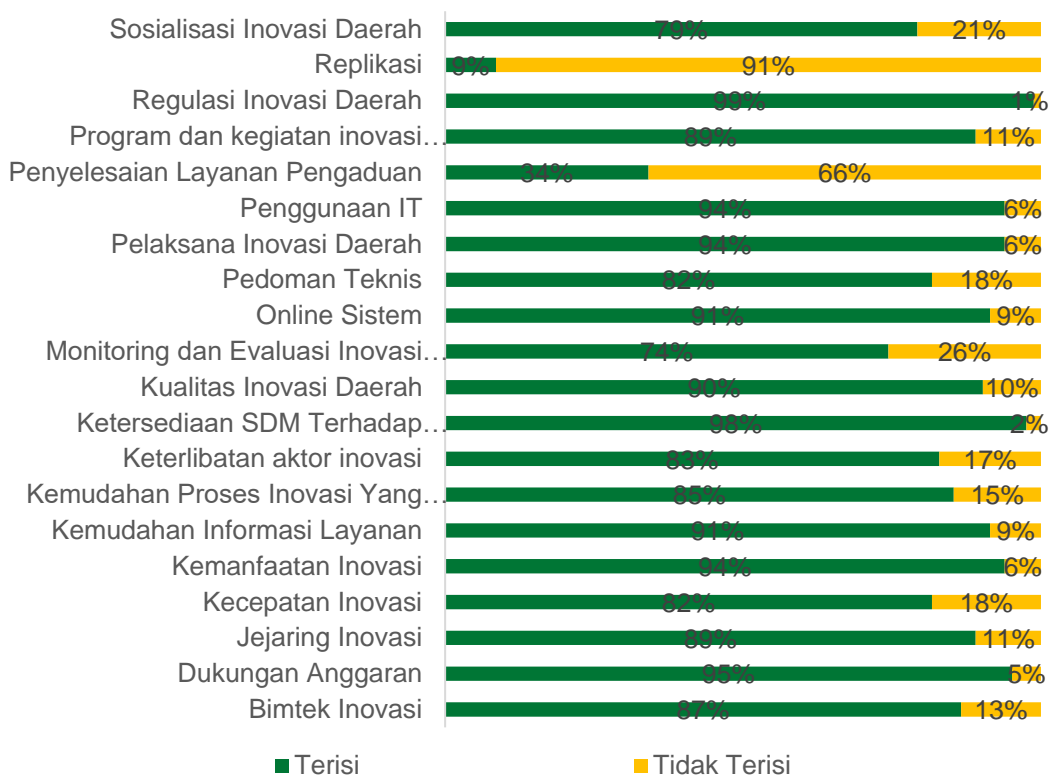
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 53. Diagram Inovasi Kota Yogyakarta berdasarkan Skor Kematangan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi Kota Yogyakarta didominasi dengan skor kematangan sedang (antara 50-100) sebanyak 49 (59.76%) inovasi. Selanjutnya, dengan skor kematangan tinggi sebanyak 33 (40.24%) inovasi.

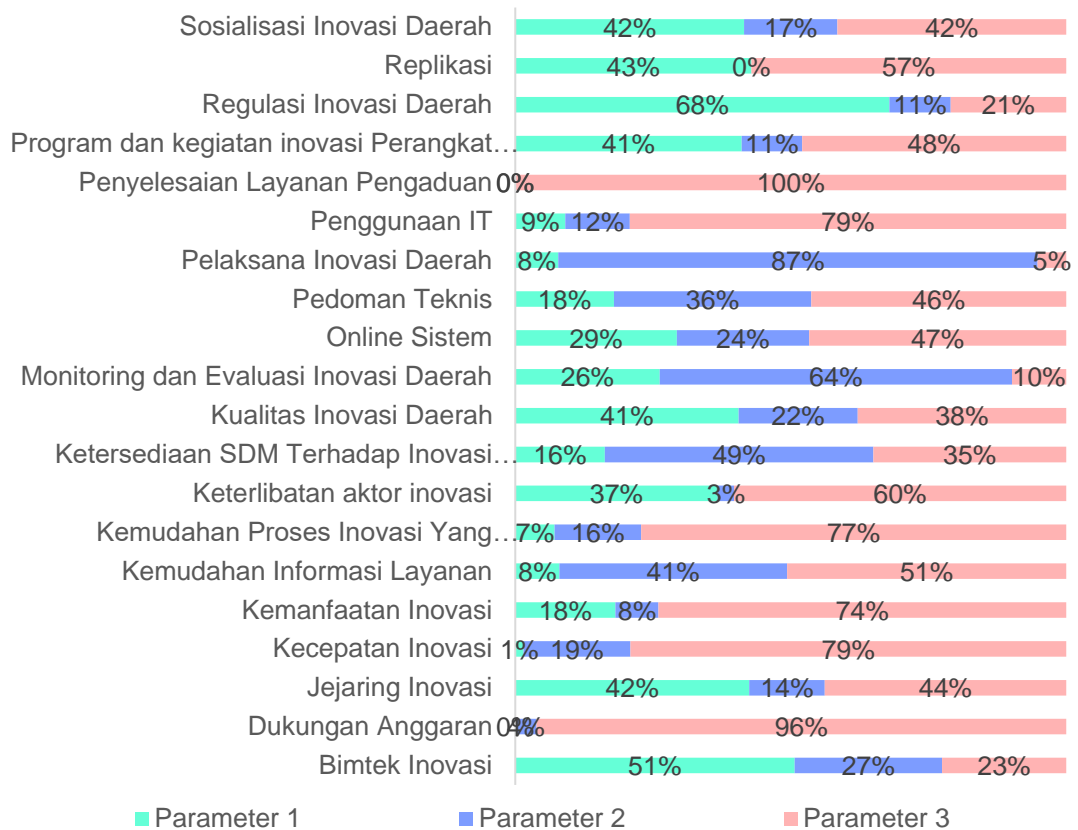
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Dukung Dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Yogyakarta

Dari 62 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Yogyakarta diperoleh rata-rata keterisian data dukung pada indikator satuan inovasi yaitu 81.95%, sedangkan 18.05% lainnya tidak dilengkapi dengan data dukung. Indikator yang memiliki tingkat keterisian data dukung tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi dengan tingkat keterisian sebesar 99%. Sedangkan indikator yang memiliki tingkat keterisian data dukung terendah adalah indikator Replikasi dengan tingkat keterisian hanya 9% yang artinya 91% dari inovasi yang dilaporkan tidak dilengkapi data dukung pada indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Yogyakarta

Secara umum, indikator-indikator yang dilengkapi dengan data dukung pada satuan inovasi daerah Kota Yogyakarta terisi dengan Parameter 3 (51.57%). Selanjutnya, 25.26% terisi dengan Parameter 1 dan 23.17% terisi dengan Parameter 2. Berdasarkan gambar di atas, beberapa indikator yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter 3 diantaranya yaitu indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan (100%), Dukungan Anggaran (96%), dan Penggunaan IT (79%). Beberapa indikator yang sudah memiliki keterisian dominan pada parameter 2 diantaranya yaitu indikator Pelaksana Inovasi (87%), Monev Inovasi (64%), dan Ketersediaan SDM (49%). Adapun indikator yang memiliki keterisian dominan pada parameter 1 tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi (68%) yang artinya 68% inovasi yang dilaporkan telah memiliki data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kota Yogyakarta beserta Skor Kematangannya (SK)

Tabel 6. Daftar Inovasi Kota Yogyakarta

NAMA INOVASI	SK
MANTUL (MANTEN ANYAR ENTUK TELU)	129
PARON (PARKIR ONLINE)	124
MANTRA SARILAYA (MAKAM AMAN DAN TERTATA RAPI)	124
SISTEM REGISTRASI ONLINE (SIREGOL) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	124
APLIKASI NGLARISI	122
SAPA RATU (SARANA PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU TANPA TURUN DARI KENDARAAN)	118
LAYANAN KONSULTASI HUKUM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI "MBAK RATU" (MASYARAKAT TERBUKA AKSES, PROSEDUR DAN ATURAN HUKUM)	117
ONE STOP KAVLING MAKAM	117
SISTEM KAMPUNG PANGAN LESTARI TERPADU	115
SERAT LAYON (SERAHKAN AKTA KEMATIAN SAAT PEMBERANGKATAN LAYON/JENASAH)	113
DILAN E-IRTP DIGITALISASI LAYANAN SERTIFIKASI PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA YOGYAKARTA	113
CEK POIN JOGJA (LAYANAN INFORMASI POTENSI INVESTASI KOTA YOGYAKARTA BERBASIS ANDROID YANG TERINTEGRASI DENGAN JOGJA SMART SERVICE (JSS)	113
JESICA MARON (JENDELA INFORMASI KECAMATAN MANTRIJERON)	112
INOVASI MOBGEN (PELAYANAN MOBIL JENAZAH MELALUI APLIKASI JSS)	112
RAMPUNG PANERTIB (GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB)	110
PANDUAN PEMBINAAN DAN KONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	110
REVITALISASI KAWASAN PINGGIR SUNGAI UNTUK PENGEMBANGAN RTH PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA	109
RETROFIT PJU LINGKUNGAN HEMAT ENERGI	109
MINI CORPU	109
PERCEPATAN PELAYANAN TERPADU K4 DI KECAMATAN GEDONGTENGAN	108
SIMPEL SALDO ONSITE DI KOTA YOGYAKARTA (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN SANITASI AIR LIMBAH DOMESTIK SISTEM ONSITE DI KOTA YOGYAKARTA)	108
BENDUNG LEPEN KAMPUNG MRICAN KELURAHAN GIWANGAN	108
BANTU PERI IUMK OSS (MEMBANTU PERIJINAN IUMK MELALUI OSS)	107
SIMPEN JALU (SISTEM INFORMASI MANAGEMEN PJU)	106
INOVASI PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN SUNGAI WINONGO DAN SUNGAI GAJAHWONG	105
LAYANAN DAWAI ASMARA (DIGITALISASI ARSIP KEPEGAWAIAN DENGAN APLIKASI YANG MANFAAT DAN RAMAH)	104
MISI ZIMBRA (MIGRASI MAIL SERVER DARI QMAIL MENJADI ZIMBRA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)	103
FORM DAFTAR KEBUTUHAN DAN PERMINTAAN DATA AUDIT OPERASIONAL	103

NAMA INOVASI	SK
WARSIMAH (WARUNG EDUKASI OMAH KREATIF LOEDJI 16)	103
BINTANG SRAWUNG KOTA (PEMBINAAN TATA RUANG SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN RUANG YANG BERKUALITAS DI KOTA YOGYAKARTA)	102
REVITALISASI TANAMAN LANGKA DAN BERFILOSOFI PADA RTH PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA	102
MASUK SATU KELUAR EMPAT	100
E-MUP	100
"DODOLAN" PROGRAM PENINGKATAN PENETRASI PASAR INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KOTA YOGYAKARTA	98
SIMONS APLIKASI MONITORING SISWA UNTUK ORANG TUA	97
INOVASI E-REGULASI	96
INOVASI SIDOL (SISTEM INFORMASI ADUAN SOSIAL ONLINE)	95
EMBUN KRISTAL (ENAM BULAN PEMERIKSAAN TOTAL)	95
PENGUAT TANGAN MENJADI PANGAN	94
SILALING (SISTEM INFORMASI KELOLA LINGKUNGAN)	94
SISTEM PANDUAN RANCANG (SIMPANCANG) INTEGRASI DATA RTBL DI KOTA YOGYAKARTA	93
KUKUS (BUKU SAKU SPIP)	93
TAMAN PINTAR SCIENSATION VIRTUAL TOUR	92
SIKAP (SISTEM INFORMASI KEKERASAN ADUAN ANAK DAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER)	92
OPTIMALISASI PENILAIAN RISIKO MELALUI MEDIA E-BOOK BAGAN ALUR	92
KONSOL ADMINDUK (KONSULTASI ONLINE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)	92
SIM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	91
KKA-ON! GOOGLE SHEET (KERTAS KERJA AUDIT ONLINE MENGGUNAKAN APLIKASI GOOGLE SHEET)	91
PANDUAN PENGAWASAN DAN KONSULTASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	91
TAMAN PINTAR INTEGRATED ECO MANAGEMENT	90
SMART DSS	89
HOME CARE RUMAH SAKIT JOGJA (HORE MASJO)	89
ARISAN PAK GELIS (PENGARSIPAN DAN INVENTARISASI DOKUMEN PENDUKUNG DUPAK DENGAN GOOGLE APLIKASI)	88
PEMBUATAN FITUR PENGINGAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA	87
NETWORK SHARING SEBAGAI PUSAT DOKUMEN PENUGASAN AUDITOR	87
SITARU (SISTEM INFORMASI TATA RUANG)	84
AH4SIAAP (AKSELERASI HASIL MELALUI 4 SIAP AKSI SISTEM PENYELENGGARAAN PELATIHAN KETERAMPILAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PENCARI KERJA DI KOTA YOGYAKARTA)	84
PAKET KOMANAN (PAKET KOMPLIT GONDOMANAN)	83
DAHAN APAKIN (DAFTAR BAHAN AUDIT PENDAHULUAN UNTUK AUDIT KINERJA)	83
REKAPITULASI TERPADU HASIL PENGAWASAN INTERNAL BERBASIS NETWORK SHARING DALAM RANGKA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	83

NAMA INOVASI	SK
M-POSYANDU	82
FASUMKU LEGAL (FASILITASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK PENGURUSAN ALAS HAK FASILITAS UMUM DIATAS PERSIL MASYARAKAT)	82
MONITORING BOARD SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PENGAWASAN	81
SI BANK TANAH (SISTEM INFORMASI BASIS DATA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM)	81
PENURUNAN ANGKA UNMET NEED MELALUI KIE KELOMPOK DI KAMPUNG KB PAJEKSAN KELURAHAN SOSROMENDURAN KECAMATAN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA DIY	81
SABARO (SAPA ARUH BACIRO ANTISIPASI CORONA)	80
TANDING MARU (TANDUR ING LEMAH TURU)	80
KAMPUNG SAYUR	79
SISTEM INFORMASI KEBUDAYAAN (SIKEB)	78
SCIENCE CORNER TAMAN PINTAR DI YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA)	77
PODJOK LITERASI	77
MUCHILD TV	77
E- PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (E- PKP) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA MENUJU PEGAWAI UNGGUL	76
LAHAN KE SURGA (LAYANAN KELURAHAN KECAMATAN TERINTEGRASI LAYANAN SURAT WARGA)	76
PELATIHAN LELE CENDOL KELURAHAN PANEMBAHAN	76
PUDASERA (PUSAT DATA SERAPAN ANGGARAN)	73
WIDURI (WISATA EDUKASI KEARSIPAN)	73
OPTIMALISASI KIE PADA IBU HAMIL DAN IBU NIFAS DALAM MENJARING KEIKUTSERTAAN KB DI KELURAHAN PRAWIRODIRJAN, KECAMATAN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA	71
PENGOLAHAN DATA PADA SIM DAN PENGINTEGRASIAN KKA UNTUK DESK AUDIT	70
DASA PERMATA (DANUREJAN SATU DENGAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN)	70
PACAR CANTIK (PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN)	67
SIMPINTER (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERINTEGRASI)	67

The Page Left is Blank



BAB III

REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN

Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 5 Kabupaten/Kota yang memiliki predikat yang berbeda pada hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

A. KABUPATEN BANTUL

Kabupaten Bantul memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 40,97 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Bantul melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

B. KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Kabupaten Gunung Kidul memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 54,24 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Gunung Kidul melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

C. KABUPATEN KULON PROGO

Kabupaten Kulon Progo memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 56,64 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kulon Progo melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

D. KABUPATEN SLEMAN

Kabupaten Sleman memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 53,42 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sleman melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Infomatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

E. KOTA YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta memiliki predikat daerah sangat inovatif dengan skor 63,29 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: melakukan refleksi inovasi, penyebarluasan inovasi, rapat koordinasi teknis inovasi bidang, diseminasi inovasi daerah, penghargaan inovasi, Bantuan HKI. Namun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga dapat melakukan pembinaan kepada kota Yogyakarta melalui Refleksi inovasi, melakukan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah, rapat teknis inovasi provinsi, eksebis dan konferensi seminar dan penghargaan inovasi.